

SKRIPSI

**PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN BERBASIS TEKNOLOGI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA
KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diusulkan oleh

ERNI M

Nomor Stambuk : 105610505514



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN BERBASIS TEKNOLOGI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh

ERNI M

Nomor Stambuk : 105610505514

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : **Pengaruh Administrasi Perpajakan berbasis Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba**


Nama Mahasiswa : **Erni. M**

Nomor Stambuk : **10561 05055 14**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Unismuh Makassar

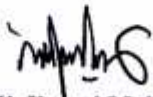

Nasrulhaq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 0007/FSP/A.3-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

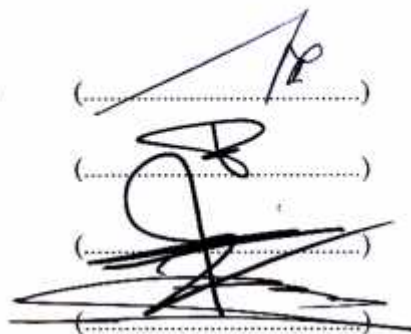
Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH (Ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ERNI M

Nomor Stambuk : 10561 05055 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 19 Januari 2019

Yang Menyatakan,

ERNI M

ABSTRAK

ERNI M. *Pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba* (dibimbing oleh H. Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari).

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan tentang pajak. Sedangkan pajak merupakan iuran kepada negara dimana wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajaknya yang (yang dapat dipaksakan) yang berhutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan sistem perumusan variabel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data menggunakan analisis linear sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berbasis teknologi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci : administrasi perpajakan berbasis teknologi, wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta Malla (Almarhum) dan Samo' serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil.
2. Bapak Dr.H.Muhlis Madani,M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Nuryanti Mustari,S.IP,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr.Ihyani Malik,S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Rikoca Squad (Wana, Aziza, Mitra, Ikka, Eni, Miss) yang senang tiasa memberikan dorongan, semangat serta motivasi bagi penulis disaat penulis lagi malas menyelesaikan skripsi. Terkhusus untuk kalian terima kasih banyak sudah menjadi sahabat terbaik bagi penulis yang selalu ada disaat suka dan duka.
6. Dayang-dayang kost (InaHo, Yuli dan Liyo) yang telah banyak memantu memberikan semangat dan masukan bagi penulis dalam masa penyusunan skripsi.
7. Teman seperjuangan Kelas F Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 14 yang telah memberikan warna, saling menguatkan dan memberi motivasi untuk mencapai gelar sarjana
8. Teman KKP ke XV Desa Maccini Baji terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis
9. Teman semasa sekolah di SD 276 campulea, MTs Tonrong dan MAN 1 Bulukumba yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada kakak Wahya, Widya, Ita, Fatma, kakak Ta_Ryu, kakak Adriani, Linda, Niar dan Adinda. Dan masih banyak lagi yang penulis tidak sempat menyebutkan namanya yang selalu memerikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Yang sudah penulis anggap seagai adik Dedes dan kiki yang senang tiasa memerikan dorongan, semangat dan do'a bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Woollim Stand (Infinfite, Lovelyz dan Golden Child) yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini terkhusus untuk Kim Sung Gyu yang selalu menjadi Bias andalan penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas do'a dan dukungan kalian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 19 Januari 2019

Erni M

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENERIMAAN TIM	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Administrasi Perpajakan	8
B. Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi	15
C. Konsep Pajak.....	17
D. Kerangka Pikir	20
E. Definisi Operasional.....	21
F. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Teknik Pengabsahan Data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Analisis Deskripsi	37
C. Pengaruh administrasi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tanggapan responden masyarakat melakukan pendaftaran pajaknya di kantor KPP Pratama Bulukumba.....	37
2. Tanggapan responden masyarakat terbantu dengan sistem perpajakan berbasis teknologi	39
3. Tanggapan responden masyarakat yang terdaftar rutin memberikan laporan	40
4. Indikator pendaftaran	41
5. Tanggapan responden masyarakat sudah patuh dalam menyampaikan SPT tepat waktu di kantor pajak Bulukumba.....	43
6. Tanggapan responden pengurusan SPT berbasis online melalui <i>e_fillingmasyarakat</i>	44
7. Tanggapan responden masyarakat sudah memahami cara menyimpan data secara online	45
8. Indikator cara menyampaikan SPT	47
9. Indikator pendaftarantanggapan responden menyampaikan SPT secara rutin kepada wajib pajak.....	48
10. Tanggapan responden masyarakat menerima petunjuk bagaimana cara menyampaik surat pemberitahuan.....	49
11. Tanggapan responden masyarakat mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan	50
12. Indikator Surat pemberitahuan.....	52
13. Kinerja pemerintah pajak tiga tahun terakhir	53
14. Tanggapan responden masyarakat puas adanya konseling yang diberikan oleh pegawai kantor pajak	54
15. Tanggapan responden masyarakat melaporkan kesulitan dalam membayar pajak	55
16. Tanggapan responden masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konseling	56
17. Indikator penyelenggaraan konseling	58
18. Tanggapan responden masyarakat membayar pajak di bank persepsi.....	59

19. Tanggapan responden masyarakat mengetahui pembayaran online di lakukan di bank persepsi.....	60
20. Tanggapan responden masyarakat merespon dengan baik pembayaran pajak yang disediakan bank persepsi	61
21. Indikator pembayaran pajak.....	63
22. Tanggapan responden administrasi perpajakan berbasis teknologi	64
23. Tanggapan responden masyarakat menerima informasi waktu penyampaian SPT	68
24. Tanggapan responden masyarakat tepat waktu menyampaikn SPT sesuai waktu yang ditentukan	69
25. Tanggapan responden masyarakat tidak marah ketika diingatkan tentang SPTnya	70
26. Indikator tepat waktu dalam menyapaikan SPT	71
27. Tanggapan responden masyarakat telah memenuhi kewajiban pajaknya.....	73
28. Tanggapan responden masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya	74
29. Tanggapan responden masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya menerima teguran	75
30. Indikator memenuhi kewajiban pajaknya	77
31. Tanggapan responden masyarakat tidak memiliki tunggakan pajak.....	78
32. Tanggapa responden masyarakat yang memiliki tunggakan membayar secara keseluruhan	79
33. Tanggapan responde masyarakat enanyakan apa mereka memiliki tuggakan pajak	80
34. Indikator tidak mempuyai tunggakan pajak.....	82
35. Tanggapan responden masyarakat membayar paak tepat waktu	83
36. Tanggapan Responden masyarakat bersikap baik kepada pegawai yang menagih pajaknya.....	84
37. Tanggapan responden masyarakat selalu dirumah saat pembayaran pajak	86
38. Tabel 4.38 Indikator pembayaran pajak tepat waktu	87
39. Tanggapan responden masyarakat bebas dari tindak pidana pajak.....	88

40. Tanggapan responden masyarakat terlibat tindak pidana menerima sanksi ..	90
41. Tanggapan responden masyarakat yang terlibat tindak pidana diberi nasehat	91
42. Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibagian pajak	92
43. Tanggapan responden kepatuhan wajib pajak	93
44. Anova	97
45. Coefficients	97
46. Model Summary	97

DAFTAR TABEL

47. Tanggapan responden masyarakat melakukan pendaftaran pajaknya di kantor KPP Pratama Bulukumba.....	37
48. Tanggapan responden masyarakat terbantu dengan sistem perpajakan berbasis teknologi	39
49. Tanggapan responden masyarakat yang terdaftar rutin memberikan laporan	40
50. Indikator pendaftaran	41
51. Tanggapan responden masyarakat sudah patuh dalam menyampaikan SPT tepat waktu di kantor pajak Bulukumba.....	43
52. Tanggapan responden pengurusan SPT berbasis online melalui <i>e_fillingmasyarakat</i>	44
53. Tanggapan responden masyarakat sudah memahami cara menyimpan data secara online	45
54. Indikator cara menyampaikan SPT	47
55. Indikator pendaftarantanggapan responden menyampaikan SPT secara rutin kepada wajib pajak.....	48
56. Tanggapan responden masyarakat menerima petunjuk bagaimana cara menyampaik surat pemberitahuan.....	49
57. Tanggapan responden masyarakat mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan	50
58. Indikator Surat pemberitahuan.....	52
59. Kinerja pemerintah pajak tiga tahun terakhir	53
60. Tanggapan responden masyarakat puas adanya konseling yang diberikan oleh pegawai kantor pajak	54
61. Tanggapan responden masyarakat melaporkan kesulitan dalam membayar pajak	55
62. Tanggapan responden masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konseling	56
63. Indikator penyelenggaraan konseling	58
64. Tanggapan responden masyarakat membayar pajak di bank persepsi.....	59

65. Tanggapan responden masyarakat mengetahui pembayaran online di lakukan di bank persepsi.....	60
66. Tanggapan responden masyarakat merespon dengan baik pembayaran pajak yang disediakan bank persepsi	61
67. Indikator pembayaran pajak.....	63
68. Tanggapan responden administrasi perpajakan berbasis teknologi	64
69. Tanggapan responden masyarakat menerima informasi waktu penyampaian SPT	68
70. Tanggapan responden masyarakat tepat waktu menyampaikn SPT sesuai waktu yang ditentukan	69
71. Tanggapan responden masyarakat tidak marah ketika diingatkan tentang SPTnya	70
72. Indikator tepat waktu dalam menyapaikan SPT	71
73. Tanggapan responden masyarakat telah memenuhi kewajiban pajaknya.....	73
74. Tanggapan responden masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya	74
75. Tanggapan responden masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya menerima teguran	75
76. Indikator memenuhi kewajiban pajaknya	77
77. Tanggapan responden masyarakat tidak memiliki tunggakan pajak.....	78
78. Tanggapa responden masyarakat yang memiliki tunggakan membayar secara keseluruhan	79
79. Tanggapan responde masyarakat enanyakan apa mereka memiliki tuggakan pajak	80
80. Indikator tidak mempuyai tunggakan pajak.....	82
81. Tanggapan responden masyarakat membayar paak tepat waktu	83
82. Tanggapan Responden masyarakat bersikap baik kepada pegawai yang menagih pajaknya.....	84
83. Tanggapan responden masyarakat selalu dirumah saat pembayaran pajak	86
84. Tabel 4.38 Indikator pembayaran pajak tepat waktu	87
85. Tanggapan responden masyarakat bebas dari tindak pidana pajak.....	88

86. Tanggapan responden masyarakat terlibat tindak pidana menerima sanksi ..	90
87. Tanggapan responden masyarakat yang terlibat tindak pidana diberi nasehat	91
88. Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibagian pajak	92
89. Tanggapan responden kepatuhan wajib pajak	93
90. Anova	97
91. Coefficients	97
92. Model Summary	97

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Pajak Bulukumba..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari wajib pajak atau masyarakat terhadap kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran iuran secara langsung serta bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak dalam rangka untuk memberikan biaya kepada negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang telah dibebankan kepada setiap warga Negara khususnya di Indonesia, sebagai cerminan atas kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berbeda pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak tersebut. Hal tersebut harus sesuai dengan sistem yang berlaku yakni sistem *self assessment* yang telah dianut atau digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya kewajiban melakukan pembinaan/penyeluhan, pelayanan, dan pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak berusaha sebaik

mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak.

Sikap yang menuntut wajib pajak membayar pajak lebih dulu untuk mendapat haknya, tidak sesuai dengan pengertian pajak sebagai suatu jenis pungutan yang dapat dipaksakan dan tidak dapat dikaitkan dengan suatu prestasi. Namun, tindakan macam ini, walau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, terpaksa dilaksanakan untuk memaksakan pembayaran pajak karena kesadaran kewajiban membayar pajak dikalangan masyarakat sangat tipis dan administrasi pajak yang kurang sempurna tidak mampu melakukannya menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan. Namun, apapun alasannya, tindakan macam ini bertentangan tata tertip dalam negara hukum.

Kesadaran memenuhi kewajiban pajak hanya sebagian dari kewajiban bernegara. Orang yang membayar pajak belum tentu memenuhi kewajiban pajaknya; mungkin saja pajak yang dibayar itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bahkan orang yang bersedia menyumbangkan untuk negara belum tentu memenuhi kebutuhan kewajiban pajaknya. Misalnya, bila kelebihan pajak yang tercantum pada SPT (surat pemberitahuan) disumbangkan pada negara, itu bukan berarti bahwa SPT yang diisi itu telah benar.

Satu hal yang sering mempengaruhi perhitungan pajak adalah sikap atau perspsi dari wajib pakjak. Pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan wajib pajak. Walaupun semua sependapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh semua warga Negara baik dalam negri maupun luar negri demi kepentingan negara tersebut, tetapi tidak semua wajib pajak dapat menerima

jumlah beban yang ditimpakan kepadanya. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengalihkan atau mengurangi jumlah beban tersebut, baik dengan cara yang ilegal maupun dengan melakukan usaha yang bertentangan dengan hukum.

Suatu instansi berkewajiban melayani warganya dengan menghormati haknya, terlepas dari kewajibannya membayar pajak yang tidak ada hubungan dengan hak tersebut. Apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, maka dia dapat dipaksa atau dihukum menurut hukum yang berlaku supaya dia membayar pajaknya. Jadi, bukan dengan cara mempersulit dan menolak memberikan pelayanan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban membayar pajak.

Hal lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami dan mengetahui, sedangkan perpajakan merupakan hal-hal mengenai pajak, pembayaran dan kewajiban sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak.

Pada hakikatnya kondisi sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu variabel yang berperang besar dalam menentukan penerimaan pajak. Untuk mendapatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat dilakukan dengan dua upaya, yaitu pertama, dengan menekankan tindakan manipulasi pajak yaitu memberikan sanksi atau denda yang tinggi dalam melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Kedua,

melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang didalamnya tetuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpaajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seirama dengan perkembangan yang terjadi baik dalam perekonomian, perdagangan internasional, teknologi informasi maupun aspek lainnya untuk penyesuaianya telah dilakukan amandemen terhadap masing-masing UU perpajakan tersebut diatas. Amandemen yang dilakukan tidaklah secara bersama-sama sekaligus dalam suatu waktu tertentu. Melainkan sebagian-bagian bergantung UU Perpajakan mana yang harus dilakukan perubahan seirama dengan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi dan dipengaruhi.

Bagi setiap Negara, baik itu Negara yang sedang berkembang maupun Negara maju, sumber pendapatan merupakan hal yang penting, pendapatan bagi modal serta pembiayaan pembangunan senantiasa yang selalu diusahakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pembahasan tentang pajak dan sistem perpajakan, minimal akan berkaitan dengan seperangkat peraturan berupa undang-undang, tarif pajak serta tentang jenis dan macam pajak. Dengan peraturan perpajakan, maka keabsahan yuridis hukum pajak sebagai hukum publik. Pelaksanaan dari peraturan pajak tersebut telah memberikan kekuatan untuk mengharap warga Negara memahami peraturan yang ada. Akan tetapi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih kurang. Seperti halnya masyarakat di Kabupaten Bulukumba, masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak masih kurang, dilihat dari respon masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti yang terjadi pada bulan Mei, pegawai kantor pajak Bulukumba mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya wajib pajak harus membayar pajaknya. Selain itu, respon masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak juga kurang baik. Meski pembayaran pajak biasa dilakukan secara online sesuai yang telah diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, namun respon masyarakat masih sangat kurang. Seperti pada saat pembayaran pajak masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak, salah satu alasannya karena tidak berada di rumah pada saat pembayaran pajak dilakukan. Sebagian masyarakat juga tidak melakukan pembayaran secara online, sehingga menghambat pembayaran pajak

Dari uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang Pengaruh Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, berdasarkan dengan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Administrasi perpajakan berbasis teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kabupaten Bulukumba?
2. Berapa besar tanggapan responden tentang pengaruh Administrasi Perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang saya teliti berdasarkan uraian diatas antara lain adalah sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratam Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP pratama Kabupaten Bulukumba

C. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan dibidang sosial politik dan administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama kabupaten Bulukumba.
2. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan referensi atau kajian bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan ilmu administrasi serta dapat menjadi pedoman dalam penelitian dibidang perpajakan.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran secara langsung bagaimana pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Prtama Kabupaten Bulukumba.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan seabgai bahan referensi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah atau pemberi layanan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba tentang permasalahan wajib pajak.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Perpajakan

1. Pengertian Administrasi

Berkaitan dengan konsep administrasi, administrasi berasal dari kata *to administer*, yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan ketatausahaan dalam mengelola suatu informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya suatu tujuan yang telah terhimpun dalam organisasi tersebut. (Sukidin Damai, 2011:04). Dalam arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis untuk memudahkan memperolehnya kembali. Sedangkan dalam arti luas, istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih atau sekelompok orang sehingga tercapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Namun tidak semua kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang itu bisa disebut administrasi.

Menurut The Liang Gie dalam buku administrasi publik (1976) mendefinisikan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan atau perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. The Liang Gie juga telah berhasil mengumpulkan lebih dari empat puluh lima definisi administrasi, akan

tetapi semua itu dapat dikelompokkan dalam tiga macam pengertian administrasi saja yakni:

1. Administrasi diistilakan sebagai hal yang digunakan dalam pengertian suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
2. Administrasi yang dipergunakan dalam pengertian ketik menetik, surat menturat, catat mencatat atau yang lebih dikenal dengan kata tatausahaan
3. Istilah administrasi yang digunakan dalam pengertian pemerintah atau administrasi publik.

Soetarto dan Soewarno (1978), administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan senganap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dalam penjurusan sumber-sumber dan bahan untuk mencapai tujuun yang diinginkan (John M. Pliffner). Siagian (1978) mendefinisiakan administrasi adalah sebagai keseluruhan kegiatan atau proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas tingkat rasionalitas atau kesadaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Admistrasi juga diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses adminsitrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hirarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan tercapai. Di

tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan-bahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau professional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas.

Administrasi sebagai usaha kerja sama muncul bersama dengan timbulnya peradaban manusia melalui kemampuannya untuk menggunakan pikirannya sehingga melahirkan cipta, rasa dan karsa. Pengembangan cipta, rasa dan karsa memungkinkan manusia dapat bekerja sama antara satu dengan yang lainnya yang merupakan unsur utama administrasi.

Memperhatikan pengertian tersebut diatas, maka pengertian administrasi mengandung pengertian yang luas dan yang sempit. Perbedaan kandungan makna administrasi yang dikemukakan para ahli administrasi tidak berarti bahwa administrasi itu bersifat *uncertainty*, tetapi lebih disebabkan karena sudut pandang dan perkembangan aliran pemikiran yang dianut atau yang dipengaruhi para ahli administrasi.

2. Pengertian Administrasi Perpajakan berbasis Teknologi

a. Konsep Administrasi Perpajakan berbasis Teknologi

Administrasi perpajakan menurut Lumbantoruan seperti yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:72), adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan tentang pajak. Administrasi perpajakan sangatlah berperang penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara baik dalam negeri maupun luar negeri.

Liberty Padiangan berpendapat bahwa administrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan mengupayakan untuk menganalisis peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan berlaku serta penerimaan amanat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Suatu Negara dapat dengan mudah mencapai kesuksesan dan sasaran yang telah ditentukan dapat diharapkan untuk menghasilkan penerimaan pajak secara optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu Negara yang dipilih.

Sedangkan menurut Sadhani (2005:60) mengemukakan pengertian modernisasi perpajakan adalah suatu proses perubahan atau pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak secara komprehensif, yang meliputi berbagai aspek dibidang teknologi informasi yaitu antara lain perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya manusia dalam rangka memenuhi tujuan serta untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak atau warga Negara terhadap perpajakan sehingga tercapainya produktifitas kinerja aparat perpajakan sehingga dapat mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Semenjak tahun 2002 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan atau mengeluarkan suatu program perubahan (*change room*) atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Adapun tujuan utama reformasi perpajakan saat itu adalah untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi

dan gas alam. Modernisasi perpajakan merupakan paradigm atau perubahan dalam bidang perpajakan dari yang berbasis perpajakan menjadi berbasis fungsi yang lebih mengutamakan atau mengedepankan dibidang aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan.

Gunadi (2006) mendefinisikan administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak, sedangkan administrasi perpajakan dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembangan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan suatu perangkat unsur utama yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan yang secetara bersama-sama menjelaskan fungsi dan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan instansi yang mengolola system dan pengelolaan proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan harus sebagai *service point* dimana mereka mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Menurut Lumbatorun (1997), administrasi perpajakan (*tax Administration*) ialah cara atau upaya prosedur pengenaan serta pemungutan pajak mengenai peran administrasi perpajakan,

Adapun dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004) adalah agar mencapai efektivitas yang sangat tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisien berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas menggunakan ukuran :

1. Kepatuhan pajak suka rela,
2. Prinsip-prinsip *self assesment*,
3. Menyediakan informasi kepada wajib pajak,
4. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran
5. Peningkatan dalam kontrol dan supervisi,
6. Sanksi yang tepat.

b. Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi

teknologi Informasi dan Komunikasi atau (TIK) merupakan alat yang digunakan untuk mengelola berbagai data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpang, memanipulasi berbagai data dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu (wawan Wardiana, 2002). Adapun pengertian lain tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut (Yusufhadi Miarso 2004) adalah berbagai sarana dan prasarana (*hardware, software, usaware*) sistem dan

metode untuk porolehan, penerimaan, pengiriman, penafsiran, pengolahan, penyimpanan, pengorganisasian dan penggunaan data yang bermakna.

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya dibidang teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan, tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak tidak ketinggalan untuk meningkatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi dibidang modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-sistem*. Sistem administrasi perpajakan juga sangat unggul dimana kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi sehingga mejadi administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikann oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-payment*, *Taxpayers' Account* dan *e-councling* dan sistem modern lainnnya diharapkan meningkatkan control yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktur Jendral Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas (sofyan,2005:4). Tujuan diperbaharuinya sistem administrasi perpajakan dengan adanya *e-sistem* tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Sedangkan menurut Librty (2008:35) *e-sistem* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet,

sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, cepat dan akurat.

Teknologi informasi menunjuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, menambah serta menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pemanfaatan teknologi ini merupakan upaya yang mendukung perubahan yang berbasis pada modernisasi sistem administrasi perpajakan.

B. Konsep Kepatuhan Wajib pajak

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, Gibson, dkk (2000) berpendapat bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, sekelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut Nasucha (2004:131) dikutip oleh Mochammad Djudi kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, Nasucha mendefinisikan kepatuhan adalah kepatuhan pada otoritas aturan-aturan sedangkan kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi Undang-Undang perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut James et al dalam timbul Hamonagan (2012:84) secara sederhana kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Simon James *et al* (n.d) yang dikutip oleh Gunadi (2005) pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi berbagai kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan tanpa perlu diadakannya berbagai pemeriksaan, investigasi seksama, ancaman ataupun peringatan, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” keadaan wajib pajak terhadap kepatuhan serta kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakannya yang tercermin dalam berbagai situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) antara lain sebagai berikut:

1. Memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh wajib pajak.
2. Mengisi biodata formulir pajak secara lengkap, benar dan jelas.
3. Wajib pajak dapat Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Tepat waktu dalam membayar pajak.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut kepatuhan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT dengan tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Wajib pajak tidak memiliki atau mempunyai tunggakan pajak baik untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh atau menerima izin untuk mengansur atau menunda pembayarannya.
3. Wajib pajak Tidak pernah dijatuhi berbagai hukuman karena telah melakukan berbagai tindakan pidana khususnya di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
4. Pernah melakukan pemeriksaan Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak, untuk setiap jenis pajak yang terutang dikoreksi pada pemeriksaan yang terakhir paling banyak lima persen
5. Telah melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki pendapatan wajar tanpa mengecualikan atau dapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiscal yang telah dilaporkan kepada diaudit oleh akuntan.

C. Konsep pajak

Dilihat dari konsep perpajakan, Pajak menurut Adriani (guru besar pada Universitas Amsterdam dalam Hukum Pajak) dalam buku perpajakan Hamdan Aini (1993:1) pajak adalah iuran kepada Negara dimana wajib pajak berkewajiban

untuk memayar pajaknya (yang dapat dipaksakan) yang berhutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam definisi ini dikatakan fungsi *budgetair* dari pajak, sedang fungsi lain adalah fungsi *regulerend* (mengatur)

Selain itu, pajak menurut MJH Smeets adalah prestasi warga Negara kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya. Tanpa adanya kontraprestasi atau masalah hubungan yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut diatas, maka dapat dipahami beberapa unsure pajak, yaitu:

5. Iuran pada Negara
6. Dapat dipaksakan
7. Berdasarkan undang-undang
8. Tidak mendapatkan prestasi kembali
9. Untuk kepentingan umum

Untuk dapat dipaksakan bersifat yuridis artinya akan dapat membawa akibat hukum bagi para pelanggarnya.

a. Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur suatu keadaan wajib pajak atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

- a) Suatu Pajak yang tinggi dapat dikenakan terhadap berbagai macam minuman salah satunya minuman keras, sehingga dapat mengurangi konsumsi minuman keras di Indonesia
- b) Pajak yang tinggi juga dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif atau gaya hidup mewah.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong atau meningkatkan ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

b. Jenis Pajak

1. Pajak subjektif dan objektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang memerhatikan keadaan pribadi masyarakat atau wajib pajak yang dicari alasannya secara objektif untuk mendapatkan pajaknya yang erat kaitannya dengan keadaan material, pajak objektif, pertama melihat suatu objek selain pada suatu benda yang dapat pula berupa suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membayar pajak,

sehingga keadaan berulah dicari subjeknya, tidak mempersoalkan apakah subjek berdiam di dalam negeri atau berdiam diluar negeri.

2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

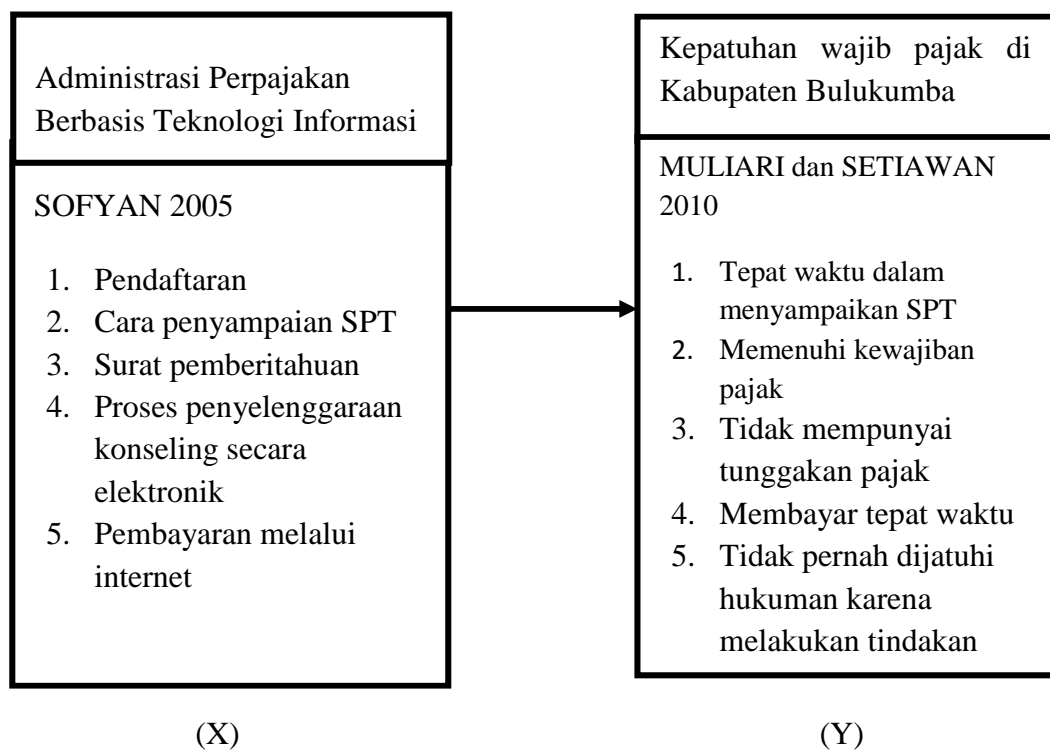
Menurut Berge (aliran modern) sesuatu pajak itu adalah pajak langsung kalau tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang yang bersangkutan, kalau tidak dinyatakan dengan tegas maka berarti pajak itu adalah pajak tidak langsung. Dipandang dari sudut ekonomis menurut smeed lebih dahulu dibedakan tiga unsure sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak : adalah mereka yang oleh pembuat undang-undang diwajibkan untuk membayar pajak.
2. Destinataris : adalah mereka yang menurut maksud pembuat undang-undang seharusnya memikul pajak.
3. Pemikul pajak : adalah mereka yang benar-benar memikul dan merasakan tekanan pajak.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir berdasarkan dengan judul yang diangkat yaitu Pengaruh Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Kantor KPP Pertama Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:

Gambar kerangka pikir



E. Definisi Operasional

1. *E-registration* (pendaftaran)

Yang dimaksud dengan *e-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan sistem informasi

perpajakan. Dimana masyarakat atau wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri secara online sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak

2. *E-filling* (isi atau cara penyampaian surat pemberitahuan)

E-filling merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak atau masyarakat secara online untuk menyimpan data-data seperti surat pemberitahuan (SPT). *E-filling* ini dapat memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar wajib pajak

3. *E-SPT*

Maksud dari *e-SPT* disini adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan dalam rangka membantu wajib pajak untuk memudahkan menyimpan surat pemberitahuan (SPT) secara aman.

4. *E-counseling* (proses penyelenggaraan konsuling)

E-counseling merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang konselor kepada konseli untuk membantu menyelesaikan suatu masalah yang di alami. Maksudnya seorang wajib pajak yang mengalami masalah atau kesulitan dapat di bantu oleh karyawan yang berada di kantor pajak.

5. *E-payment* (pembayaran)

E-payment merupakan alat pembayaran yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara.

Adapun defisi operasional dari kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bulukumba antara lain :

1. Tepat dalam menyampaikan SPT

Maksudnya wajib pajak harus menyampaikan SPT di kantor KPP Prtama kabupaten Bulukumba secara tepat waktu setiap jenis pajak yang diberlakukan dalam dua tahun terakhir sehingga wajib pajak dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

2. Memenuhi kewajiban pajak

Setiap wajib pajak dikatakan patuh dalam wajib pajaknya apabila telah berkewajiban untuk memenuhi kewajiaban pajak pada setiap jenis pajak yang berlaku.

3. Tidak mempunyai tunjangan pajak

Maksudnya setiap wajib pajak tidak memiliki atau mempunyai tunjangan pajak baik semua jenis pajak kecuali telah memiliki izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dari kantor pajak

4. Membayar pajak tepat waktu

Wajib pajak berkewajiban membayar pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh pihak kantor pajak yang bersangkutan.

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana

Maksudnya wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan kurang waktu sepuluh tahun terakhir sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Membayar pajak tepat waktu, wajib pajak dianjurkan untuk membayar wajib pajaknya tepat waktu. Dengan demikian wajib pajak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya administrasi perpajakan yang berbasis teknologi, masyarakat atau wajib pajak dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut untuk membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak yang digunakan oleh wajib pajak sangat membantu, karena dengan sistem teknologi tersebut wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan gampang, tidak repot-repot lagi ke bank atau kantor pajak untuk membayar pajak, cukup menggunakan sistem aplikasi online yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

F. Hipotesis

Ho : tidak ada pengaruh penerapan administrasi perpajakan berbasis elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba

H1 : ada pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulumba.

Adapun tampilan rumus pada Hipotesis ini yaitu antara lain sebagai berikut:

Ho : $r = 0$

H1 : $r \neq 0$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang peneliti lakukan berlangsung selama kurang lebih dua bulan yakni dari bulan Agustus sampai Oktober 2018. Adapun Lokasi penelitian ini bertempat di Bintarore, Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Dengan banyak pertimbangan peneliti melaksanakan penelitian di Bintarore, Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang berhubungan dengan Pengaruh Administrasi Perpajakan berbasis teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor KPP Prtama Kabupaten Bulukumba yaitu untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak yang berbasis teknologi serta kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran wajib pajak yang tepat waktu dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak kantor pajak.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan sistem perumusan variable. Dimana dalam hal ini, peneliti membandingkan antara hubungan dan pengaruh dua variable. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, melihat pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

2. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah tipe penelitian survei, dengan menjelaskan pengaruh variable (x) yaitu pengaruh administasi perpajakan dan variable yang lainnya (y) kepatuhan wajib pajak

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba berjumlah 60 orang

Sampel yang digunakan adalah sampel acak berstrata atau simpel random sampling. Simpel random sampling merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka random. Tabel angka random merupakan tabel yang dibuat dalam komputer berisi angka-angka yang terdiri dari kolom dan baris, dan cara pemilihannya dilakukan secara bebas.

Adapun salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin antara lain :

$$n = + \frac{N}{1 + N (e^2)}$$
$$n = + \frac{60}{1 + 60 (0,05^2)}$$
$$n = 52$$

dimana

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan, yaitu penelitian berdasarkan hasil jawaban para responden mengenai pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba. Yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait catatan atau dokumen berbentuk jadi yang telah dimiliki oleh kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data tersebut yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya, data-data itu dianalisis dan disimpulkan secara induktif. Dan akhirnya dapat kita memutuskan bahwa hipotesis ditolak atau diterima.

Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan dengan cara mengadakan atau melakukan kunjungan di bintangore ujung bulu kabupaten bulukumba tentang Pengaruh Administasi Perpajakan Berbasis Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

b. Kuesioner

Teknik pengumpulan data secar kuesioner yaitu dengan cara membagikan daftar berbagai pertanyaan-pertanyaan (angket) kepada responden agar dapat mengisi daftar isisan secara objektif tentang pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah pengambilann data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tentang pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari responden berasarkan, khususnya dari kuesioner dideskripsikan dan dituangkan kedalam table frekuensi dan presentase.

Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah menggunakan statistic sebagai alat analisa data. Dimana dalam statistic menggunakan data skala tikert kuesioner menggunakan skala tikert, menurut kinnear (1998) dalam husein umar, skala ini berhubungan dengan pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik. (Husein Umar, 2005:89 dengan rumus sebagai berikut:

- a. Sangat sesuai/Sangat baik Skor = 5
- b. Sesuai/Baik Skor = 4
- c. Cukup sesuai/Cukup baik Skor = 3
- d. Tidak sesuai/Tidak baik Skor = 2
- e. Sangat tidak sesuai/Sangar tidak baik Skor = 1

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, sebab melalui analisis data akan tampak hasil dan manfaatnya, terutama dalam pemecahan masalah penelitian ini dan dapat mencapai tugas akhir penelitian. Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dipisahkan dan dikelompokkan lalu dianalisis dengan menggunakan statistik. Proses analisi data dapa dimulai dengan meneliti atau menelah seluruh data-data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi dan kuesioner. analisis dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat pentingdalam penelitian, sebab melalui analisis data ini akan menampakkan manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian. Setelah data yang didiperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut di olah untuk mengetahui tingkat prestase jawaban responden penulis, penulis menggunakan teknik Linear sederhana.

Metode regresi sederhana yaitu teknik statis yang digunakan untuk mencari pengaruh antara dua variable atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Adapun kegunaan metode regresi sederhana ini adalah untuk melihat atau mencari pengaruh antara variable administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variable independen (X) dengan variable dependen (Y)

Rumus regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y^2 = a + bX$$

Keterangan:

Y^2 = variabel dependent (nilai diprediksikan)

X = variable independen

a = konstanta (nilai Y^2 apabila X=0)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penerunan)

a. Rumus Presentase Skor Untuk Setiap Indikator

$$\frac{\text{indikator} = \text{jumlah responden}}{\text{jumlah skor ideal}}$$

$$\times 100 = \text{jumlah skor porolehan}$$

No	Skoring	Keterangan
1	0-20	Tidak Baik
2	21-40	Kurang Baik
3	41-60	Cukup Baik
4	61-80	Baik
5	81-100	Sangat Baik

(sumber data : data primer)

F. Teknik Pengabsahan Data

Instrument penelitian kuesioner yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliable. Untuk mengetahui validitas dan rebilitas kuesioner harus perlu dilakukan pengujian atas kuesioner itu sendiri dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas.

- a. Uji realibitas dimaksudkan untuk dapat mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variable. Realibilitas dapat diukur dengan menggunakan uji statistik *crombach's alpha* (α). satu variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai *crombach's alpha* $>0,60$ (Imam Ghozali, 2007;41)
- b. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indicator dengan total skor variable.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kantor Pajak Pratama Bulukumba

Nomor PMK-62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Bulukumba memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Bulukumba mempunyai dua Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai (KP2KP Snjai) dan Kabupaten Kepulauan Selayar (KP2KP Benteng).

Kabupaten Bulukumba terletak antara 5020' dan 5040' Lintang Selatan dan antara 119058' dan 120028' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Teluk Bone di sebelah timur,
- 2) Kepulauan Selayar di sebelah selatan
- 3) Sinjai di sebelah utara
- 4) bantaeng di sebelah barat

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1154,7 km² terdiri dari 10 kecamatan yang membawahi 109 desa dan 27 kelurahan. Mitologi penamaan “Bulukumba” , konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku” dan “Mupa”

yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya”. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama “Tanahkongkong“, disitulah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. “Bangkeng Buki”, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian Timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari Barat sampai ke Selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang bentuk Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Hari jadi Kabupaten Bulukumba adalah tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten

Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

2. Visi dan misi dan motto kantor pajak pratama bulukumba

a. Visi

Visi KPP Pratama Bulukumba

menjadi model kantor pelayanan pajak terbaik, profesional, dan berintegritas.

b. Misi

Misi KPP Pratama Bulukumba

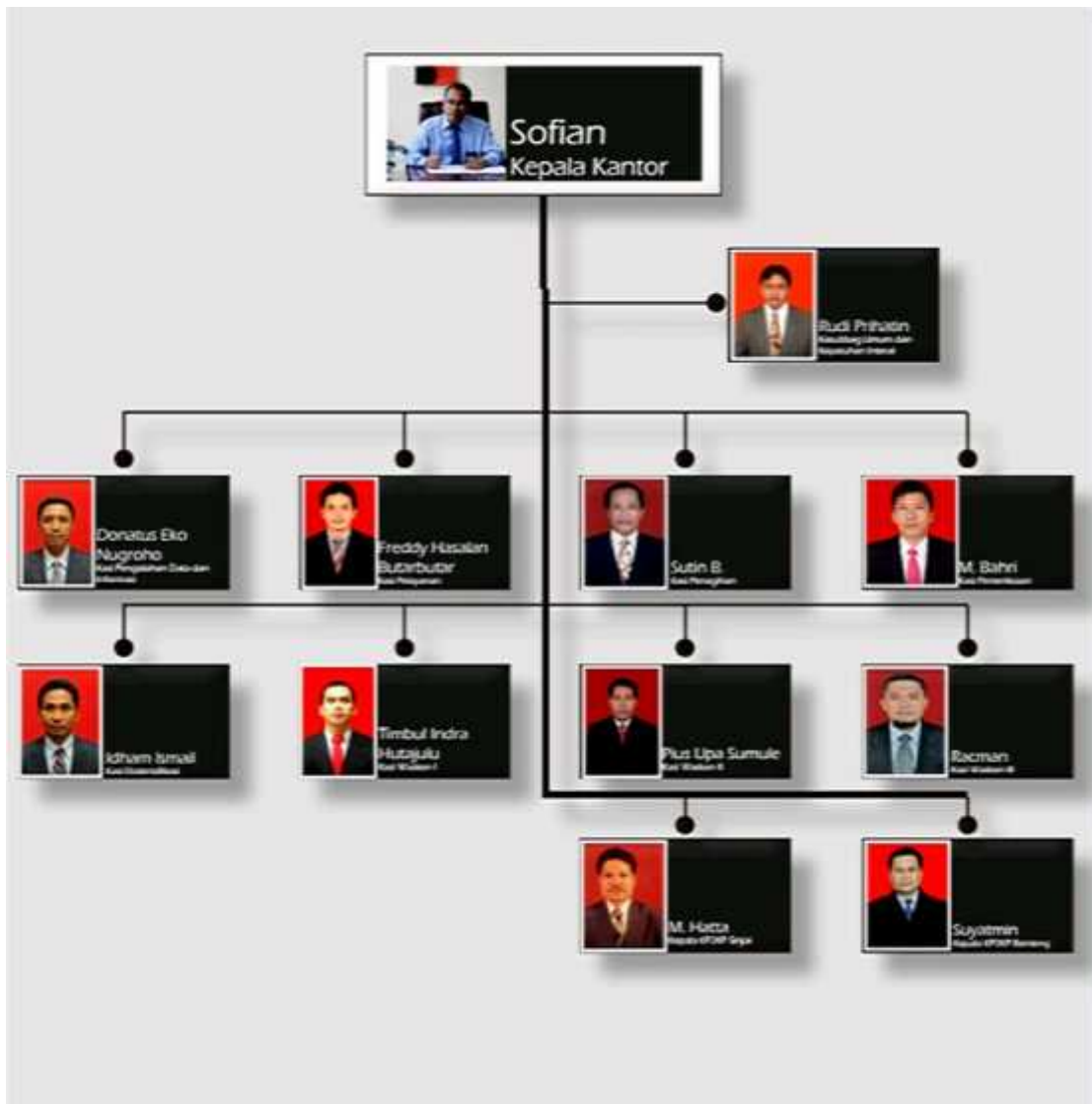
1. Menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat secara adil dan tegas demi tercapainya penerimaan pajak sukarela dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi
2. Melayani secara profesional dan berintegritas kepada kepuasan stake
3. Melakukan sinergi antar satuan kerja maupun internal kelembagaan, saling membantu demi tercapainya target dan pembangunan nasional
4. Membangun sumber daya manusia aparatur pajak yang bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja pasti

c. Motto

KPP Pratama Bulukumba dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat memiliki motto “phinisi” kata tersebut diambil dari salah satu kapal tradisional khas Indonesia tepatnya dari kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Arti “phinisi” dalam motto pelayanan KPP

Pratama Bulukumba memberikan pelayanan yang Profesional, Harmonis dan Iniatif.

3. Struktur Organisasi



4. Sarana dan prasana Kantor KPP Pratama Bulukumba

1. KPP Pratama Bulukumba menyediakan empat loket TPT dan tiga loket Help Desk yang selalu siap melayani wajib pajak selain itu, KPP Pratama juga memiliki ruang tunggu yang luas dan nyaman
2. KPP Pratama memiliki satuan keamanan yang beranggotakan 5 orang yang siap membantu dalam pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak
3. KPP Pratama memiliki perpustakaan sekaligus ruang layanan sendiri untuk pembuatan kode e_billing. Selain itu KPP Pratama bulukumba juga menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk memudahkan dalam pembayaran pajak
4. KPP Pratama Bulukumba menyediakan loket Payment Point yang didukung oleh kantor pos Indonesia untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak
5. Halaman KPP Pratama Bulukumba yang luas menjadikan ketersediaan lahan parkir yang sangat memadai
6. KPP Pratama Bulukumba memiliki dua ruang konsultasi yang nyaman untuk sarana konsultasi perpajakan antara wajib paak dan pegawai bersangkutan
7. KPP Pratama Bulukumba juga menyediakan mushala yang cukup menampung sekitar 30 jamaah.

B. Analisis Deskripsi

1. Hasil tanggapan Responden tentang Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

a. Pendaftaran

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sesuai dengan *Self Assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator Pendaftaran dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.1 sampai dengan 4.3 sebagai berikut

Tabel 4.1: Tanggapan Responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajaknya di kantor KPP Pratama Bulukumba

Item Pernyataan	Jumlah	Persentase	Jumlah Skor
Tidak mendaftar	1	1.9%	1
Jarang melakukan pendaftaran	8	15.4%	16
Ragu-Ragu	11	21.2%	33
Mendaftar	18	34.6%	72
Rutin Mendaftaran	14	26.9%	70
Jumlah	52	100.0%	192

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan mendaftar dengan jumlah sebanyak 18 responden atau sebesar 34,6% masyarakat atau wajib pajak melakukan pendaftaran di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak melakukan pendaftaran dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1,9% yang tidak melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP pajak Pratama Kabupaten Bulukumba.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan

diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s} \frac{p}{it} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 73,846$$

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang telah mendaftarkan pajaknya di Kantor KPP Pratama Bulukumba berada dalam kategoria baik, dengan total 73,846. Meskipun demikian masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten Bulukumba masih dikatakan kurang patuh atau tingkat kesadarannya masih kurang dalam pendaftaran wajib pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba.

Tabel 4.2: Tanggapan Responden tentang masyarakat terbantu dengan adanya sistem perpajakan berbasis teknologi terutama dibagian pendaftaran pajak

Item pernyataan	Jumlah	Presentase	Jumlah Skor
Tidak Terbantu	-	-	-
Kurang Terbantu	1	1.9%	2
Ragu-Ragu	2	3.8%	6
Terbantu	20	38.5%	80
Sangat Terbantu	29	55.8%	145
Jumlah	52	100.0%	233

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan Sangat Terbantu dengan jumlah sebanyak 29 responden atau sebesar 55,8% masyarakat atau wajib pajak merasa terbantu dengan adanya pendaftaran pajak melalui jalur internet atau teknologi. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Kurang Terbantu dengan jumlah 1 dengan tingkat presentase 1,9% yang menyatakan kurang terbantu dengan adanya pendaftaran pajak melalui jalur internet atau teknologi.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum z} \times 100\% = \frac{473}{520} \times 100\% = 91,15$$

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem perpajakan berbasis teknologi terutama dibagian pendaftaran pajak ini berada pada kategori sangat baik, dengan total 91,15. Sehingga masyarakat dapat mendaftarkan pajaknya melalui situs *online* yang disediakan oleh Direktorat kantor pajak sebagai bentuk partisipasinya.

Tabel 4.3: Tanggapan Responden tentang masyarakat yang terdaftar rutin memberikan pelaporan di Kantor pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah Skor
Tidak Rutin	-	-	-
Kurang Rutin	3	5.8%	6
Ragu-Ragu	2	3.8%	6
Ruting	33	63.5%	132
Sangat Rutin	14	26.9%	70
Jumlah	52	100.0%	214

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan Rutin dengan jumlah sebanyak 33 responden atau sebesar 63,5% masyarakat atau wajib pajak yang rutin melakukan pelaporan di Kantor Pajak Bulukumba. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah 2 responden dengantingkat presentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum z} \times 100\% = \frac{z}{z} \times 100\% = 82,307$$

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang sudah terdaftar pajaknya melakukan pelaporan secara rutin di Kantor KPP Pratama Bulukumba ini berada pada kategori sangat baik dengan total 82,307. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa masyarakat atau wajib pajak yang telah terdaftar rutin melakukan atau memberikan pelaporan di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba. sehingga masyarakat atau wajib pajak sudah dapat dikatakan patuh. Meskipun demikian, wajib pajak yang telah terdaftar harus lebih meningkatkan kesadarannya dalam memberikan pelaporan kepada Kantor Pajak Bulukumba.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator pendaftaran pada variabel Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi dapat disimpulkan pada tabel 4.4 Sebagai berikut:

Tabel 4.4: Indikator pendaftaran

Item Pertanyaan	TS	KS	RR	S	SS	Jumlah
Pertanyaan	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Skor
Item 1	1,9	15,4	21,2	34,6	26,9	74,230
Item 2	-	1,9	3,8	38,5	55,8	89,615
Item 3	-	5.8	3.8	63.5	26.9	82,307
Rata-Rata	2,3	7,3	10	50.38	30	246,152

(Sumber : data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator Administrsi Perpajakan berbasis teknologi dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi

yaitu 50,38% responden memberikan penilaian setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 2,3% responden yang memberikan penilaian tidak setuju.

Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator pernyataan pendaftaran pada variabel (X) Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah item}} = \frac{21}{3} = 82$$

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan sub indikator dari indikator Pendaftaran pada variabel (X) yaitu sebesar 82. Sehingga dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Meskipun berada pada kategori sangat baik, akan tetapi masyarakat atau wajib pajak belum sepenuhnya dikatakan patuh dalam mendaftarkan pajaknya di kantor pajak Bulukumba, sehingga kepatuhan tersebut perlu ditingkatkan meskipun pendaftaran pajak sudah bisa dilakukan secara online akan tetapi tidak semua masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara online karena adanya faktor jaringan yang tidak memadai dikarenakan jarak geografis yang cukup jauh dari perkotaan sehingga untuk mengakses teknologi itu tidak tersedia atau kurang tersedia.

b. Cara Penyampaian SPT

Sebagai wajib pajak, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT setiap Tahunnya. Adapun jangka waktu pelaporan SPT adalah sampai 31 maret yang berlaku bagi wajib pajak orang Pribadi dan 30 april untuk wajib pajak badan.

Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP), selain itu SPT juga dapat dilakukan dengan cara mengirim lewat jasa pos/ekspidisi, dan juga pelaporan online melalui jasa web yang disediakan.

Unuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator cara penyampaian SPT dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.5 sampai dengan 4.7 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.5: Tanggapan Responden tentang masyarakat sudah patuh dalam menyampaikan SPT dengan tepat waktu di Kantor KPP Pratama Bulukmba

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Patuh	6	11,5%	6
Kurang Patuh	21	40,4%	42
Ragu-Ragu	12	23,1%	36
Patuh	12	23,1%	48
Sangat Patuh	1	1,9%	5
Jumlah	52	100%	137

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan Kurang Patuh dengan jumlah sebanyak 21 responden atau sebesar 40,4% wajib pajak yang kurang patuh dalam menyampaikan SPT dengan tepat waktu di Kantor KPP Pratama

Bulukumba. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Sangat patuh dengan jumlah responden 1 dengan tingkat persentase 1,9% .

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 52,692$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah patuh dalam menyampaikan SPTnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kantor pajak Pratama Bulukumba berada dalam kategori Cukup baik dengan total 52,692. Meskipun berada dalam kategori cukup baik tetapi kepatuhan masyarakat dalam menyampaikan SPTnya di Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan masyarakat atau wajib pajak tersebut secara keseluruhan masih tidak patuh atau tidak melakukan kewajiannya sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh Kantor pajak Bulukumba.

Tabel 4.6: Tanggapan Responden tentang pengurusan SPT berbasis online melalui *E_filling*

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Sesuai	-	-	-
Kurang Sesuai	2	3,8%	4
Ragu-Ragu	12	23,1%	36

Sesuai	35	67,3%	140
Sangat Sesuai	3	5,8%	15
Jumlah	52	100%	195

Sumber : data primer2018

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan Sesuai dengan jumlah sebanyak 35 responden atau sebesar 67,3% bahwa masyarakat pengurusan SPT SPT berbasis online melalui *E_filling* dipergunakan dengan baaik oleh wajib pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan kurang setsuai dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s} \frac{p}{i} \times 100\% = \frac{1}{z} \times 100\% = 75$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pengurusan SPT berbasis online melalui *E_filling* berada dalam kategori cukup baik dengan total 75. Meskipun demikian masyarakat atau waji pajak seagian besar masih kurang terbantu dengan adanya sistem *E_filling* yang diberlakukan oleh Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba karena sebagian masyarakat atau wajib pajak masih kurang memahami atau tidak mengetahui cara mengakses melalui

teknologi dan juga kurangnya ketersediaan jaringan di daerah pedesaan untuk mengakses teknologi tersebut.

Tabel 4.7: Tanggapan Responden tentang masyarakat memahami cara menyimpan data secara online

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Mamahami	-	-	-
Kurang Memahami	2	3,8%	4
Ragu-Ragu	20	38,5%	60
Memahami	23	44,2%	92
Sangat Memahami	7	13,5%	35
Jumlah	53	100%	191

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan memahami dengan jumlah sebanyak 23 responden atau sebesar 44,2% wajib pajak memahami cara menyimpan data secara online. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan kurang memahami dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang

masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s} \frac{p}{i} \times 100\% = \frac{1}{z} \times 100\% = 73,461$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami atau mengetahui langkah-langkah untuk menyimpan data secara online erada dalam kategori cukup baik dengan total 73,461. Meskipun dalam kategori cukup baik, akan tetapi masyarakat atau waji pajak sebagian besar masih kurang memahami bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menyimpan data-data secara online.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator pendaftaran pada variabel Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi dapat disimpulkan pada tabel 4.8 Sebagai berikut:

Tabel 4.8:Indikator cara penyampaian SPT

Item Pertanyaan	TS	KS	RR	S	SS	Jumlah skor
Pertanyaan	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
Item 1	11,5	40,4	23,1	23,1	1,9	52,692
Item 2	-	3,8	23,1	67,3	5,8	75
Item 3	-	3,8	38,5	44,2	13,5	73,461
Rata-Rata	2,3	11,52	26,94	46,92	12,32	201,153

(Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepemimpinan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 46,92% resonden

memberikan penilaian setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 2,3% responden yang memberikan penilaian tidak setuju.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan cara penyampaian SPT pada variabel (X) Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut:

$$\frac{ju}{ju} = \frac{67,051}{3} = 67,051$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah total keseluruhan sub indikator dari indikator cara penyampaian SPT pada variabel (X) yaitu sebesar 67,051 berada pada kategori baik. Meskipun SPT sudah dapat dilakukan dengan cara online, akan tetapi tidak semua masyarakat atau wajib pajak mengetahui cara penyampaian SPT secara online atau masyarakat kurang paham dalam mengakses teknologi serta kurangnya ketersediaan jaringan dipelosot daerah karena jarak geografis yang cukup jauh sehingga dalam mengakses teknologi di daerah tersebut sangat kurang.

c. Surat Pemberitahuan

Alternatif pilihan layanan kepada masyarakat wajib pajak dalam hal penyampaian SPTnya dapat dilakukan dengan cara menyampaiakan kembali bukti penerimaan SPT elektronik (*print out*) induk SPT wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, dimana wajib pajak terdaftar. Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator Pendaftaran dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.9 sampai dengan 4.11 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.9: Tanggapan Responden tentang penyampaian secara rutin SPT kepada wajib pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Total
Tidak Rutin	2	3,8%	2
Kurang Rutin	4	7,7%	8
Ragu-Ragu	21	40,4%	63
Rutin	19	36,5%	75
Sangat Rutin	6	11,5%	30
Jumlah	52	100%	178

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah sebanyak 21 responden atau sebesar 40,4% wajib pajak penyampaian secara rutin SPT kepada wajib pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak rutin dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_p}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 68,461$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan tentang penyampaian secara rutin SPT kepada wajib pajak berada pada kategori baik dengan total 68,461. Meskipun demikian wajib pajak tidak sepenuhnya dikatakan sudah patuh dalam menyampaikan SPTnya di kantor pajak, dalam hal ini wajib pajak dapat dikatakan masih kurang patuh atau kurangnya kesadaran mereka dalam menyampaikan SPTnya.

Tabel 4.10: Tanggapan Responden tentang masyarakat menerima petunjuk bagaimana cara menyampaikn surat pemberitahuan

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Total
Tidak Menerima	5	9,6%	5
Jarang Menerima	15	28,8%	30
Ragu-Ragu	15	28,8%	45
Menerima	11	21,2%	44
Sering Menerima	6	11,5%	30
Jumlah	52	100%	154

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan jarang menerima dan ragu-ragu dengan jumlah masing-masing sebanyak 15 responden atau sebesar 28,8% wajib pajak menerima petunjuk bagaimana cara menyampaikn surat pemberitahuan. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak setuju dengan jumlah 5 responden dengan tingkat persentase 9,6%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut:

$$\frac{s}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 59,230$$

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat menerima bantuan dari kantor pajak bagaimana cara penyampaian surat pemeritahaun (SPT) berada pada kategori Cukup Baik dengann total 59,230. Meskipun masyarakat menerima bantuan bagaimana cara menyampaikan SPT dalam kategori cukup baik akan tetapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menerima bantuan bagaimana cara dalam penyampaian SPT yang diberikan oleh Kantor pajak terhadap wajib pajak.

Tabel 4.11: Tanggapan Responden tentang masyarakat mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan

Item pernyataan	Jumlah	Presentase	Total
Tidak Mengetahui	4	7,7%	4
Kurang Mengetahui	13	25,0%	26
Ragu-Ragu	9	17,3%	27
Mengetahui	20	38,5%	80
Sangat Mengetahui	6	11,5%	30
Jumlah	52	100%	169

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan mengetahui dengan jumlah sebanyak 20 responden atau sebesar 38,5% masyarakat atau wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak setuju dengan jumlah 4 responden dengan tingkat persentase 7,7%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s \quad p}{s \quad i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 65$$

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan berada pada kategori baik dengan total 65. Meskipun demikian, masyarakat belum bisa dikatakan mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dilihat dari kategori tersebut bearti masyarakat masih ada yang tidak mengetahui batas waktu penyampaian SPT pajak penghasilan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator pendaftaran pada variabel Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi dapat disimpulkan pada tabel 4.12 Sebagai berikut:

Tabel 4.12: Indikator Surat pemberitahuan

Item Pertanyaan	TS	KS	RR	S	S S	Jumlah
Pertanyaan	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Skor
Item 1	3,8	7,7	40,4	36,5	11,5	68,461
Item 2	9,6	28,8	28,8	21,2	11,5	59,230
Item 3	7,7	25,0	17,3	38,5	11,5	65
Rata-Rata	7,3	23,82	23,84	29,62	15,36	192,691

Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepemimpinan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 29,62% responden memberikan penilaian setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 7,3% responden yang memberikan penilaian tidak setuju.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan Surat pemberitahuan pada variabe (X) Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{ju s}}{\text{ju it}} = \frac{1,6}{3} = 64,230$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah total keseluruhan sub indikator dari indikator surat pemberitahuan pada variabel (X) yaitu sebesar 64,230 berada pada kategori baik. Meskipun surat pemberitahuan berada pada kategori baik, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana cara penyampaian surat pemberitahuan kepada phak kantor serta wajib pajak masih banyak pula yang tidak mengetahui batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, jadi tingkat kesadran wajib pajak masih perlu ditingkatkan lagi sehingga wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam pembayaran pajak maupun pelaporan surat pemberitahuan pajaknya di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meingkatkan penerimaan negara adalah melalui optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Agenda aksi Direktorat Jendral pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Dimana usaha ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memerikan kewenangan perpajakan yang leih besar kepada daerah pada masa mendatang. Sedangkan usaha intensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan. Kedua memperkuat proses pemungutan. Yang ke tiga meningkatkan pengawasan yang keempat meningkatkan efesiensi administrasi dan menekankan pemungutan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis pnerimaan yang dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objektif

Tabel 4.13: kinerja pemerintahan pajak tiga tahun terakhir

Uraian	2014	2015	2016
Realisasi	Rp 157.322.331.670	Rp 247.059.611.161	Rp 250.569.772.440
Pencapaian	73.52%	86.19%	69.96%
Pertumbuhan	-4.43%	57.05%	1.42%

(sumber: data primer 2018)

d. Penyelenggaraan Konseling

Konseling atau penyuluhan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli maksud dari ahli ini adalah pengawai kantor pajak Bulukumba yang memberikan bantuan kepada wajib pajak sehingga dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayara, pendaftaran dan pelaporan atau penyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator Pendaftaran dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.14 sampai dengan 4.16 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.14: Tanggapan Responden tentang masyarakat puas adanya konseling yang diberikan oleh pihak kantor

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah Skor
Tidak Puas	9	17,3%	9
Kurang Puas	16	30,8%	32
Ragu-Ragu	10	19,2%	30

Puas	12	23,1%	48
Sangat Puas	5	9,6%	25
Jumlah	52	100%	144

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan puas dengan jumlah sebanyak 11 responden atau sebesar 23,1%. masyarakat atau wajib puas adanya konseling yang diberikan oleh pihak kantor. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak puas dengan jumlah 5 responden dengan tingkat persentase 9,6%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_p}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 55,384$$

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat terlihat puas dengan adanya antuan atau konseling yang diberikan oleh kantor pajak berada pada kategori cukup baik dengan total 55,384. Meskipun dalam kategori cukup baik seagian masyarakat merasa tidak puas dengan adanya konseling yang diberikan oleh kantor pajak kepada para waji pajak.

Tabel 4.15: Tanggapan Responden tentang masyarakat melaporkan kesulitan dalam pembayaran pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah Skor
Tidak Melaporkan	5	9,6%	5
Jarang Melaporkan	9	17,3%	18
Ragu-Ragu	9	17,3%	27
Melaporkan	14	26,9%	56
Sering Melaporkan	15	28,8%	75
Jumlah	52	100%	181

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.15 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sering melaporkan dengan jumlah sebanyak 15 responden atau sebesar 28,8% masyarakat atau wajib pajak melaporkan kesulitan dalam pembayaran pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Tidak Setuju dengan jumlah 5 responden dengan tingkat persentase 9,6%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang

masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut:

$$\frac{s}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{z} \times 100\% = 69,615$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat melaporkan atau memberitahukan setiap kesulitan dalam membayar pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba berada pada kategori baik dengan total 69,615. Meskipun erada pada kategori baik, waji pajak sebagian masih dapat di kategorikan tidak pernah melaporkan setiap kesulitan masalah dalam pembayaran pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

Tabel 4.16: Tanggapan Responden tentang masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konseling

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Memanfaatkan	-	-	-
Kurang Memanfaatkan	5	9,6%	10
Ragu-Ragu	5	9,6%	15
memanfaatkan	22	42,3%	88
Sangat Memanfaatkan	20	38,5%	100
Jumlah	52	100%	213

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.16 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan memanfaatkan dengan

jumlah sebanyak 22 responden atau sebesar 42,3% masyarakat atau wajib pajak memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konselin. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada dua item yaitu item tidak memanfaatkan dan juga item ragu-ragu dengan jumlah 5 responden dengan tingkat persentase 9,6%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum z} \times 100\% = \frac{z}{z} \times 100\% = 81,923$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konseling berada pada kategori sangat baik dengan total 81,923. Meskipun penyelenggaraan konseling di dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak di Kabupaten Bulukumba, akan tetapi wajib pajak belum dapat dikatakan patuh dan memafaatkan konseling yang telah di sediakan oleh kantor pajak Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator pendaftaran pada variabel Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi dapat disimpulkan pada tabel 4.17 Sebagai berikut:

Tabel 4.17: Indikator penyelenggaraan konseling

Item Pertanyaan Pertanyaan	TS (%)	KS (%)	RR (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah Skor
Item 1	17,3	30,8	19,2	23,1	9,6	55,384
Item 2	9,6	17,3	17,3	26,9	28,8	69,615
Item 3	-	9,6	9,6	42,23	38,5	81,923
Rata-Rata	5,44	15,76	21,52	33,84	23,44	206,922

(Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator Administrasi perpajakan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 33,84% responden memberikan setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 5,44% responden yang memberikan penilaian tidak setuju.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan Surat pemberitahuan pada variabe (X) Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{ju s}}{\text{ju it}} = \frac{2,9}{3} = 69$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah total keseluruhan sub indikator dari indikator penyelenggaraan Konseling pada variael (X) yaitu sebesar berada pada kategori baik, dengan jumlah skor sebesar 69%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden dan item-item pertanyaan, maka penyelenggaraan konseling telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada

observasi peneliti dilapangan bahwa mas masalah atau kesullitan yang dialami dalam proseses pembayaran pajak kepada pegawai kantor dan masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konseling. Sehingga pada variabel sub indikator penyelenggaraan konseling dapat dikategorikan baik dalam membantu wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

e. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus di lakukan oleh wajib pajak atau masyarakat yang telah dikenakan wajib pajak pajak oleh negara. Membayar pajak merupakan salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban. Wajib pajak (WP) melakukan sendiri perhitungan, pembayar serta pelaporan pajak terutang. Unuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator Pendaftaran dapat dilihat dari pengolahan data tambel 4.18 sampai dengan 4.20 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.18: Tanggapan Responden tentang masyarakat membayar pajak di Bank BPD sulsel

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah Skor
Tidak Sesuai	-	-	-
Kurang Sesuai	8	15,4%	16
Ragu-Ragu	7	13,5%	21
Sesuai	14	26,9%	56
Sangat Sesuai	23	44,2%	115
Jumlah	52	100%	203

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat sesuai dengan jumlah sebanyak 23 responden atau sebesar 44,2% masyarakat membayar pajak di Bank BPD sulsel. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah 7 responden dengan tingkat persentase 13,5%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum s_i} \times 100\% = \frac{Z}{Z} \times 100\% = 78,076$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui bank yang disediakan yaitu bank perspsi dan pos perspsi berada pada kategori baik dengan total 78,076. Meskipun beradap pada ketegori baik, pembayran pajak yang dilakukan di bank persepsi maupun pos persepsi tidak semua waji pajak melakukan pembayaran di bank terseut, sehingga masih dikatakan kurang patuh dalam pemayaran pajak sesuai dengan ank yang disediakan.

Tabel 4.19: Tanggapan Responden tentang masyarakat mengetahui pembayaran pajak melalui internet disediakan oleh Bank BPD sulsel

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Mengetahui	-	-	-

Kurang Mengetahui	-	-	-
Ragu-Ragu	5	11,5%	15
Mengetahui	38	75,0%	152
Sangat Mengetahui	7	13,5%	35
Jumlah	52	100.%	202

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 38 responden atau sebesar 75,0% masyarakat atau wajib pajak mengetahui pembayaran pajak melalui internet disediakan oleh Bank BPD sulsel. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah 5 responden dengan tingkat persentase 11,5%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s} \frac{p}{i} \times 100\% = \frac{z}{z} \times 100\% = 77,692$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa pembayarann pajak melalui jalur internet disediakan oleh bank persepsi berada pada kategori baik dengan total 77,692. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi wajib pajak

tidak sepenuhnya tahu bahwa pembayaran pajak melalui internet disediakan oleh bank persepsi.

Tabel 4.20: Tanggapan Responden tentang masyarakat merespon baik pembayaran pajak yang disediakan oleh Bank BPD sulsel

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah Skor
Tidak Merespon Baik	-	-	-
Kurang Merespon Baik	2	3,8%	4
Ragu-Ragu	8	15,4%	24
Merespon Baik	30	61,5%	120
Sangat Merespon Baik	10	19,2%	50
Jumlah	52	100%	198

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.20 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan merespon baik dengan jumlah sebanyak 30 responden atau sebesar 61,5% masyarakat merespon baik pembayaran pajak yang disediakan oleh Bank BPD sulsel. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan kurangmerespon baik dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{s} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 76,153$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat merespon dengan baik pembayaran pajak yang disediakan oleh bank persepsi berada pada kategori baik dengan total 76,153. Walaupun berada pada kategori baik, tetapi sebagian kecil masyarakat atau wajib pajak tidak merespon dengan baik adanya pembayaran pajak melalui internet yang disediakan oleh bank persepsi.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator pendaftaran pada variabel Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi dapat disimpulkan pada tabel 4.21 Sebagai berikut:

Tabel 4.21: Indikator pembayaran pajak

Item Pertanyaan Pertanyaan	TS (%)	KS (%)	RR (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah Skor
Item 1	-	15,4	13,5	26,9	44,2	78,076
Item 2	-	-	11,5	75,0	13,5	77,692
Item 3	-	3,8	15,4	61,5	19,2	76,153

Rata-Rata	-	5,76	11,54	55	27,7	231,921
------------------	---	-------------	--------------	-----------	-------------	----------------

(Sumber : data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator Administrasi perpajakan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 55% responden memberikan penilaian setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 5,76% responden yang memberikan penilaian kurang setuju.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan Surat pemberitahuan pada variabel (X) Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah}}{\text{jumlah}} = \frac{2,9}{3} = 77,307$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah total keseluruhan sub indikator dari indikator pembayaran pajak pada variabel (X) yaitu sebesar 77,307 berada pada kategori baik. Meskipun demikian wajib pajak belum dapat dikatakan puas dalam melakukan pembayaran pajaknya, karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak masih kurang.

Tabel 4.22: Tanggapan Responden tentang Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi

Pertanyaan	Jawaban Responden										SKOR
	TS		KS		R		S		SS		
		%		%		%		%		%	
Item 1	1	1,9	8	15,4	11	21,2	18	34,6	14	26,9	192

Item 2	-	-	1	1,9	2	3,8	20	38,5	29	55,8	232
Item 3	-	-	3	5,8	2	3,8	33	63,5	14	26,9	214
Item 4	3	5,8	5	9,6	3	5,8	28	53,8	13	25,0	199
Item 5	2	3,8	2	3,8	8	15,4	32	61,5	8	15,4	198
Item 6	6	11,5	21	40,4	12	23,1	12	23,1	1	1,9	137
Item 7	-	-	2	3,8	12	23,1	35	67,3	3	5,8	195
Item 8	-	-	2	3,8	20	38,5	23	44,2	7	13,5	191
Item 9	-	-	2	3,8	17	32,7	24	46,2	9	17,3	196
Item 10	-	-	3	3,8	9	28,8	28	53,8	12	23,1	205
Item 11	2	3,8	4	7,7	21	40,4	19	36,5	6	11,5	179
Item 12	5	9,6	15	28,8	15	28,8	11	21,2	6	11,5	154
Item 13	4	7,7	13	25,0	9	17,3	20	38,5	6	11,5	167
Item 14	3	5,8	15	28,8	5	9,6	15	28,8	14	26,9	178
Item 15	5	9,6	15	28,8	12	23,1	12	23,1	8	15,4	159
Item 16	9	17,3	16	30,8	10	19,2	12	23,1	5	9,6	144
Item 17	5	9,6	9	17,3	9	17,3	14	26,9	15	28,8	181
Item 18	-	-	5	9,6	5	9,6	22	42,3	20	38,5	213
Item 19	-	-	6	11,5	22	42,3	18	34,6	6	11,5	180
Item 20	-	-	5	9,6	10	19,2	22	42,3	15	28,8	203
Item 21	-	-	8	15,4	7	13,5	14	26,9	23	44,2	208

Item 22	-	-	-	-	6	11,5	39	75,0	7	13,5	209
Item 23	-	-	2	3,8	8	15,4	32	61,5	10	19,2	206
Item 24	-	-	2	3,8	5	9,6	33	65,3	12	23,1	211
Item 25	-	-	3	5,8	4	7,7	25	48,1	20	38,5	218
Totak Skor											4769
Rata-Rata											190

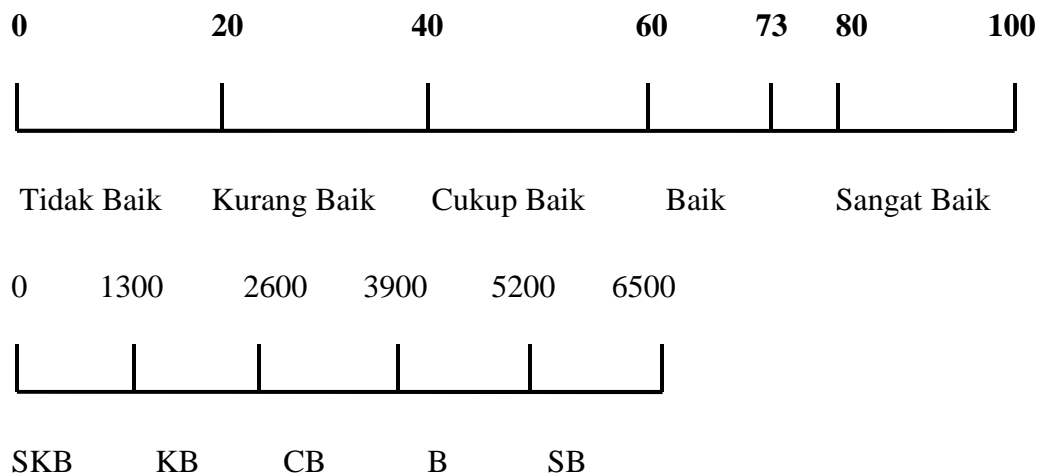
Tabel 4.22 diatas, tanggapan responden tentang Administrasi Perpajakan dengan total skor 4769 atau rata-rata skor 190 dari 25 item pertanyaan yang didapatkan pada kelima indikator. Adapun skor tertinggi pada setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kepemimpinan (X) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor Maximum} &= \text{Skor tertinggi item pertanyaan} \times N \times \text{Item pertanyaan} \\ &= 5 \times 52 \times 25 = 6500 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian Administrasi perpajakan berbasis teknologi di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 4769 maka tanggapan dari 52 responden terhadap Administrasi perpajakan berbasis teknologi di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba yaitu:

$$\frac{\text{sk}}{\text{s}} \frac{\text{p}}{\text{m}} \frac{\text{na}}{\text{na}} \times 100\% = \frac{47}{65} \times 100\% = 73\%$$

Maka hasil penelitian di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba sebesar 73% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel Administrasi Perpajakan (X) ini berada pada penilaian baik.



Keterangan

Sangat Baik (SB) = $5 \times 52 \times 25 = 5600$

Baik (B) = $4 \times 52 \times 25 = 5200$

Cukup Baik (CB) = $3 \times 52 \times 25 = 3900$

Kurang Baik (KB) = $2 \times 52 \times 25 = 2600$

Sangat Kurang Baik (SKB) = $1 \times 52 \times 25 = 1300$

2. Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor KPP Pratam Kabupaten Bulukumba

Dalam kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh jenis usaha, kondisi keuangan dan pemahaman pajak seperti yang diungkapkan oleh Suyapto dan Lasmana pada tahun 2011. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang telah

ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap pajak peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

a. Tepat dalam menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dana/pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Dalam menyampaikan SPT masa pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara manual, pengusaha kena pajak badan (PKP) mencatat, menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh hal yang terkait dengan kewajiban perpajakannya ke kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisinya secara langsung.

Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.23 sampai dengan 4.25 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.23: Tanggapan Responden tentang masyarakat mendapat informasi waktu penyampaian SPT

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Mendapat Informasi	-	-	-
Jarang Mendapat Informasi	13	25.0%	26
Ragu-Ragu	10	19.2%	30
Mendapat Informasi	20	38.5%	80
Sering Mendapat Informasi	9	17.3%	45
Jumlah	52	100%	181

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.23 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan mendapat informasi dengan jumlah sebanyak 20 responden atau sebesar 38,5% tentang masyarakat mendapat informasi waktu penyampaian SPT. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sering mendapat informasi dengan jumlah 9 responden dengan tingkat persentase 17,3%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_i}{s} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 69,615$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat masyarakat mendapatkan informasi kapan waktu waji pajak melaporkan atau menyampaikn surat pemeritahuanya berada pada kategori baik dengan total 69,615. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi dalam penyampaian kapan waktu pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan masih kurang masih kurang informasih di terima oleh wajib pajak sehingga surat pemberitahuan tidak disampaikn secara tepat waktu.

Tabel 4.24: Tanggapan Responden tentang masyarakat tepat waktu penyampaian SPT sesuai waktu yang ditentukan

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Total
Tidak Tepat waktu	1	1,9%	1
Kurang Tepat Waktu	21	40,4%	42
Ragu-Ragu	16	30,8%	48
Tepat Waktu	11	21,2%	44
Sangat Tepat Waktu	3	5,8%	15
Jumlah	52	100%	150

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.24 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan kurang tepat waktu

dengan jumlah sebanyak 21 responden atau sebesar 40,4% masyarakat tepat waktu penyampaian SPT sesuai waktu yang ditentukan. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak tepat waktu dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1,9%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_p}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 57,692$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang ditentukan di Kantor KPP Pratama Bulukumba berada pada kategori cukup baik dengan total 57,692. Meskipun dalam kategori cukup baik, akan tetapi wajib pajak masih dikatakan tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPTnya sesuai dengan waktu yang ditentukan di Kantor KPP Pratma Kabupaten Bulukumba.

Tabel 4.25: Tanggapan Responden tentang masyarakat tidak marah saat ketika diingatkan tentang SPTnya

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Total
Tidak Marah	-	-	-
Jarang Marang	1	1,9%	2
Ragu-Ragu	14	26,9%	42

Marah	32	61,5%	128
Sangat Marah	5	9,6%	25
Jumlah	52	100%	197

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.25 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan marah dengan jumlah sebanyak 32 responden atau sebesar 61,5% masyarakat tidak marah saat ketika diingatkan tentang SPTnya. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan jarang marah dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1,9%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_p}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 75,769$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak pernah mengeluh atau marah ketika diingatkan tentang penyampaian surat pemeritahuannya berada pada kategori baik dengan total 75,769. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi tidak wajib pajak tidak mengeluh atau marah saat diingatakan tentang penyampaian surat pemeritahuannya.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator tepat waktu dalam menyampaikan SPT pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan pada tabel 4.26 Sebagai berikut:

Tabel 4.26: Indikator tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Item Pertanyaan	TS	KS	RR	S	SS	Jumlah
Pertanyaan	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Skor
Item 1	-	25,0	19,2	38,5	17,3	69,615
Item 2	1,9	40,4	30,8	21,2	5,8	57,692
Item 3	-	1,9	26,9	61,5	9,6	75,769
Rata-Rata	0,38	14,18	16,14	53,48	14,62	203,076

(Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 53,48% responden memberikan penilaian setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 0,38% responden yang memberikan penilaian tidak setuju.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan tepat waktu dalam menyampaikan SPT pada variabe (Y) kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{ju}}{\text{ju}} \frac{\text{s}}{\text{it}} = \frac{2,0}{3} = 67,692$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan sub indikator dari indikator kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba (Y) yaitu sebesar 67,692 berada pada kategori baik. Walaupun demikian, wajib pajak di Kabupaten Bulukumba belum bisa diaktakan patuh secara keseluruhan. Dimana dapat kita lihat, karena tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bulukumba masih kurang sehingga dapat dioptimalkan lagi atau ditingkatkan sehingga wajib pajak dapat tepat waktu dalam menyampaikann SPTnya di Kantor pajak Bulukumba.

b. Memenuhi kewajiban pajak

Program dan kegiatan reformasi perpajakan 2008 diwujudkan dalam penerapan administrasi perpajakan modern dengan model KPP Modern . dengan demikian setiap wajib pajak dapat menanyakan hal dan kewajibannya kepada setiap aparatur atau pegawai di KPP Pratama yang telah ditunjuk untuk masing-masing wajib pajak sesuai dengan wilayah kelurahan. Setiap wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk memenuhi kewajibannya wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT). Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator memenuhi kewajiban pajak dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.27 sampai dengan 4.29 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.27: Tanggapan Responden tentang masyarakat telah memenuhi kewajiban pajaknya

Item pernyataan	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
------------------------	---------------	-------------------	--------------------

Tidak Memenuhi	-	-	-
Kurang Memenuhi	2	3,8%	4
Ragu-Ragu	23	44,2%	69
Memenuhi	19	36,5%	76
Sangat Memenuhi	8	15,4%	40
Jumlah	52	100%	189

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.27 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah sebanyak 23 responden atau sebesar 44,2% masyarakat atau wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak memenuhi dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum z} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 72,692$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bulukumba telah memenuhi kewajiban pajaknya berada pada kategori baik dengan total 72,692.

Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya atau patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Tabel 4.28: Tanggapan Responden tentang masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Setuju	-	-	-
Kurang Setuju	3	5,8%	6
Ragu-Ragu	2	3,8%	6
Setuju	39	75,0%	165
Sangat setuju	8	15,4%	40
Jumlah	52	100%	203

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.28 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 39 responden atau sebesar 75,0% masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang

masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s_i} \times 100\% = \frac{z}{z} \times 100\% = 80$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya berada pada kategori sangat baik dengan jumlah skor sebesar 80. Jadi masyarakat sebagian besar belum memenuhi kewjian pajaknya sebagai wajib pajak sehingga dapat dikategorikan bahwa mereka tidak patuh dalam pemenuhan wajib pajaknya.

Tabel 4.29: Tanggapan Responden tentang masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya bermenerima teguran

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Menerima	-	-	-
Jarang Meeerima	15	28,8%	30
Ragu-Ragu	16	30,8%	48
Menerima	10	19,2%	40
Sering Menerima	11	21,2%	55
Jumlah	52	100%	173

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.29 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah sebanyak 16 responden atau sebesar 30,8% masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya bermenerima teguran. Sedangkan penilaian paling

terendah diperoleh pada item pernyataan menerima dengan jumlah 10 responden dengan tingkat persentase 19,2%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum P_i}{\sum i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 66,538$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya menerima sanksi berupa teguran berada pada kategori baik dengan total 66,538. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi sebagian kecil wajib yang tidak memenuhi kewajibannya tidak menerima sanksi berupa teguran dari pihak yang bersangkutan, meskipun masyarakat menerima teguran akan tetapi tingkat kesadaran mereka (wajib pajak) sangat kecil sehingga menyebabkan tidak patuh atau kurang patuhnya dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator memenuhi kewajiban pajak pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan pada tabel 4.30 Sebagai berikut:

Tabel 4.30 : Indikator memenuhi kewajiban pajak

Item Pertanyaan	TS	KS	RR	S	SS	Jumlah skor
Pertanyaan	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	

Item 1	-	3,8	44,2	36,5	15,4	72,692
Item 2	-	5,8	3,8	75,0	15,4	80
Item 3	-	28,8	30,8	19,2	21,2	66,538
Rata-Rata	-	9,22	27,68	45,36	17,73	219,23

(Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 45,4% responden memberikan penilaian setuju sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 9,4% responden yang memberikan penilaian kurang setuju.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan memenuhi kewajiban pajak pada variabel (Y) kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{juis}}{\sum \text{jit}} = \frac{2.2}{3} = 73,076$$

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan sub indikator dari indikator kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba (Y) yaitu sebesar 73,076 berada pada kategori baik. Masyarakat atau wajib pajak sudah dapat dikatakan patuh dalam memayor pajaknya secara tepat waktu meskipun tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran secara tepat waktu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak.

c. Tidak mempunyai tunggakan pajak

Wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunjangan. Isu kepatuhan menjadi penting karena tidak secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan penipuan dan liar yang disebut *taxevasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan penipuan dan dilakukan secara liar yang disebut pepenghindaran pajak. Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator tidak mempunyai tunggakan pajak dapat dilihat dari pengolahan data tabel 4.31 sampai dengan 4.33 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.31: Tanggapan Responden tentang masyarakat tidak memiliki tunggakan pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Memiliki	-	-	-
Kurang Memiliki	8	15,4%	16
Ragu-Ragu	20	38,5%	60
Memiliki	20	38,5%	80
Banyak Memiliki	4	7,7%	20
Jumlah	52	100%	176

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.31 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dan juga

pada item Setuju dengan jumlah asing-masing sebanyak 20 responden atau sebesar 38,5% masyarakat tidak memiliki tunggakan pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada dua item pernyataan yaitu kurang setuju dan benyak memeiliki dengan jumlah 4 responden dengan tingkat persentase 7,7%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 67,692$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun seelumnya yang elu diselesaikan sampai sekarang berada pada kategori baik dengan total 67,692. Meskipun demikian, masih ada waji pajak yang memiliki tunggakan pajak dari tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.

Tabel 4.32: Tanggapan Responden tentang masyarakat yang memeiliki tunggakan membayar secara keseluruhan

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Setuju	-	-	-
Kurang Setuju	4	7,7%	8
Ragu-Ragu	25	48,1%	75
Setuju	17	32,7%	68
Sangat Setuju	6	11,5%	30

Jumlah	52	100%	181
---------------	----	------	-----

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.32 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah sebanyak 25 responden atau sebesar 48,1% masyarakat atau wajib pajak yang memiliki tunggakan membayar secara keseluruhan. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan kurang setuju dengan jumlah 4 responden dengan tingkat persentase 7,7%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\text{skor tertinggi}}{\text{skor terendah}} \times 100\% = \frac{5}{1} \times 100\% = 500\%$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan pajak membayar tunggakan pajaknya secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan total 69,615. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi sebagian kecil wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak memayar tunggakan pajaknya secara keseluruhan.

Tabel 4.33: Tanggapan Responden tentang masyarakat menanyakan apa mereka memiliki tunggakan pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
-------------------------	---------------	-------------------	--------------------

Tidak Menanyakan	-	-	-
Jarang Menanyakan	2	3,8%	4
Ragu-Ragu	7	13,5%	21
Menanyakan	33	63,5%	132
Sering Menanyakan	10	19,2%	50
Jumlah	52	100%	207

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.33 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan Menanyakan dengan jumlah sebanyak 33 responden atau sebesar 63,5% masyarakat atau wajib pajak menanyakan kepada pegawai kantor pajak apakah mereka memiliki tunggakan pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan jarang menanyakan dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 3,8%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{\sum p_i}{\sum z} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 79,615$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat menanyakan kepada pegawai apakah mereka memiliki tunggakan paak ditahun yang lalu berada pada kategori baik dengan total 79,615. Walaupun dalam kategori baik, akan tetapi masih ada

masyarakat atau wajib pajak yang tidak peduli dengan tunggakan yang dimilikinya dengan cara bertanya kepada pegawai bank tersebut, sehingga wajib pajak masih dikatakan kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. melalui Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi wajib pajak tidak sepenuhnya

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator tidak mempunyai tunggakan pajak pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan pada tabel 4.34 Sebagai berikut

Tabel 4.34: Indikator tidak mempunyai tunggakan pajak

Item Pertanyaan	TS	KS	RR	S	SS	Jumlah
Pertanyaan	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Skor
Item 1	-	15,4	38,5	38,5	7,7	67,692
Item 2	-	7,7	48,1	32,7	11,5	69,615
Item 3	-	3,8	13,5	63,5	19,2	79,615
Rata-Rata	-	12,3	31,75	41,16	18,84	216,922

(Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 41,16% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 7,8% responden yang memberikan penilaian tidak pernah.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan tidak mempunyai tunggaka pajak pada variabe (Y) kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{ju l u s}}{\text{ju l i t}} = \frac{2,9}{3} = 72,307$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan sub indikator dari indikator kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba (Y) yaitu sebesar 72,307 berada pada kategori baik. Sebagian besar masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten Bulukumba tidak memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun yang lalu, meskipun wajib pajak di Kabupaten Bulukumba tidak dapat dikatakan patuh secara keseluruhan akan tetapi wajib pajak di Kabupaten Bulukmba berada yang tidak mempunyai tunggakan pajak dapat dikatakan baik.

d. Membayar tepat waktu

Wajib pajak diwajibkan membayar pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah diberlakukan oleh Direktorat jendral pajak atau kantor pajak khususnya di Kabupaten Bulukumba, sehingga dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bulukumba tersebut. Dimana kita ketahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara baik itu pajak orang pribadi maupun pajak bumi dan bangunan, sebagai bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Unuk mendeskripsikan pernyataan dari 52 responden terhadap indikator membayar tepat waktu dapat

dilihat dari pengolahan data tabel 4.35 sampai dengan 4.36 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.35: Tanggapan Responden tentang masyarakat membayar pajak secara tepat waktu

Item pernyataan	Jumlah	Persentase	Jumlah skor
Tidak Sesuai	-	-	-
Kurang Sesuai	6	11,5%	16
Ragu-Ragu	21	40,4%	63
Sesuai	19	36,5%	76
Sangat Sesuai	6	11,5%	30
Jumlah	52	100%	185

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.35 di atas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah sebanyak 21 responden atau sebesar 40,4% dimana masyarakat membayar pajaknya secara tepat waktu masih berada dalam kategori ragu-ragu. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Kurang setuju dan Sangat Sesuai yang memiliki responden yang sama dengan jumlah 6 responden dengan tingkat persentase 11,5%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang

masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut:

$$\frac{s}{s} \frac{p}{i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 71,153$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat membayar pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berada pada kategori baik dengan total 71,153. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi wajib pajak belum sepenuhnya dikatakan patuh karena sebagian kecil waji pajak masih membayar pajak secara tidak tepat waktu.

Tabel 4.36: Tanggapan Responden tentang masyarakat bersikap baik kepada pegawai menagih pembayaran pajaknya.

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	1	1,9%	2
Ragu-Ragu	3	5,8%	9
Baik	38	73,1%	152
Sangat Baik	10	19,2%	50
Jumlah	52	100%	121

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.36 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan baik dengan jumlah sebanyak 38 responden atau sebesar 73,1% masyarakat atau wajib pajak merespon dengan baik pegawai kantor pajak atau seseorang yang bersangkutan dalam

menagih pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan kurang baik dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1,9%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s} \frac{p}{i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 81,538$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat merespon dengan baik pegawai atau seseorang yang bersangkutan untuk menagih pembayaran pajaknya berada pada kategori sangat baik dengan total 81,538. Sebagian besar masyarakat sangat merespon baik pegawai atau seseorang yang bersangkutan dalam menagih pembayaran pajaknya sehingga wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku meskipun tidak semua wajib pajak dapat merespon dengan baik pegawai pajak yang menagih pembayaran pajaknya.

Tabel 4.37: Tanggapan Responden tentang masyarakat selalu ada di rumah saat pembayaran pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak ada	-	-	-

Jarang Ada	9	17,3%	18
Ragu-Ragu	17	32,7%	51
Ada	14	26,9%	56
Selalu Ada	12	23,1%	60
Jumlah	52	100.0	185

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.37 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan ragu-ragu dengan jumlah sebanyak 17 responden atau sebesar 32,7%. Masyarakat atau wajib pajak yang ada di rumah saat pembayaran pajak dilakukan. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan jarang ada dengan jumlah 9 responden dengan tingkat persentase 17,3%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s}{s_i} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 71,153$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu berada di rumah ketika pembayaran pajak yang sudah di tentukan atau saat penagih pajak menagih paak wajib pajak berada pada kategori baik dengan total 71,153. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi wajib pajak tidak sepenuhnya dikatakan patauh dalam

membayara pajaknya, karena tidak semua masyarakat atau wajib pajak berada di rumah saat waktu pembayaran pajak ditentukan.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator pembayaran pajak tepat waktu pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan pada tabel 4.37 Sebagai berikut:

Tabel 4.38: Indikator Proses pmembayar pajak tepat waktu

Item Pertanyaan Pertanyaan	TS (%)	KS (%)	RR (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah skor
Item 1	-	11,5	40,4	36,5	11,5	71,153
Item 2	-	1,9	5,8	73,1	19,2	81,538
Item 3	-	17,3	32,7	26,9	23,1	71,153
Rata-Rata	-	7,68	31,56	43,06	17,68	223,844

(Sumber data: data primer 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 43,06% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 7,68% responden yang memberikan penilaian tidak pernah.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator membayar tepat waktu pada variabe (Y) kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{ju s}}{\text{ju it}} = \frac{238}{3} = 74,614$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan sub indikator dari indikator kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba (Y) yaitu sebesar 74,614 berada pada kategori baik. Meskipun berada pada kategori baik, tidak semua wajib pajak membayar pajaknya secara tepat waktu sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan patuh secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak sehingga kesadaran tersebut dapat ditingkatkan lagi sehingga masyarakat di Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu.

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bagian perpajakan

Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak salah satunya yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bagian perpajakan. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana negara diberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.

Tabel 4.39: Tanggapan Responden tentang wajib pajak bebas dari tindak pidana pajak

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Sesuai	4	7,7%	4
Kurang Sesuai	2	3,8%	4
Ragu-Ragu	1	1,9%	3
Sesuai	42	80,8%	168
Sangat Sesuai	3	5,8%	15
Jumlah	52	100.0	194

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.39 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan Sesuai dengan jumlah sebanyak 42 responden atau sebesar 80,8% mayarakat yang bebas dari tindak pidana pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Ragu-ragu dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1,9%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_i}{z} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 74,615$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang membayar pajak harus bebas dari tindakan pidana dibagian pembayaran pajak berada pada kategori baik

dengan total 74,615. Meskipun dalam kategori baik, akan tetapi masih ada masyarakat atau wajib pajak yang pernah terlibat dalam tindakan pidana di bagian perpajakan.

Tabel 4.40: Tanggapan Responden tentang masyarakat yang terlibat tindak pidana mendapat sanksi

Item pernyataan	Jumlah	Persentase	Jumlah skor
Tidak mendapat sanksi	-	-	-
Kurang mendapat sanksi	4	7,7%	8
Ragu-Ragu	1	1,9%	3
Sering mendapat sanksi	37	71,2%	148
Sangat Sering mendapat sanksi	10	19,2%	50
Jumlah	52	100%	209

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.40 di atas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sering mendapatkan sanksi dengan jumlah sebanyak 37 responden atau sebesar 71,2% yang mendapatkan berupa sanksi bagi masyarakat atau wajib pajak yang terlibat tindak pidana di bagian pajak. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Ragu-ragu dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1,9%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang

masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah sebagai berikut:

$$\frac{s}{s_i} \times 100\% = \frac{z}{Z} \times 100\% = 80,384$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah melakukan tindak pidana dibagian pajak menerima sanksi saat pembayaran pajak berada pada kategori baik dengan total 80,384. Walaupun dalam kategori baik, akan tetapi sebagian kecil waji pajak yang pernah melakukan tindak pidana dibagian pajak tidak diberi sanksi.

Tabel 4.41: Tanggapan Responden tentang masyarakat yang melakukan tindakan pidana diberikan nasehati

Item pernyataann	Jumlah	Presentase	Jumlah skor
Tidak Dinasehati	-	-	-
Jarang Dinasehati	8	15,4%	16
Ragu-Ragu	10	19,2%	30
Dinasehati	16	30,8%	64
SeringDinasehati	18	34,6%	90
Jumlah	52	100%	200

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan pada tabel 4.41 diatas sebanyak 52 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sering dinasehati dengan jumlah sebanyak 18 responden atau sebesar 34,6%, dimana masyarakat atau waji pajak yang melakukan tindakan pidana dibagian perpajakan diberikan

nasehat oleh pegawai kantor pajak Kabupaten Bulukumba. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan Kurang Setuju dengan jumlah 8 responden dengan tingkat persentase 15,4%.

Sesuai dengan tanggapan 52 responden di atas. Adapun skor tertinggi pada setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui jumlah total tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pendaftaran pajak di Kantor KPP Pratama Bulukumba adalah seagai berikut:

$$\frac{s_p}{s_i} \times 100\% = \frac{Z}{Z} \times 100\% = 76,923$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana di bagian pajak diarahkan atau diberikan masukan atau nasehat agar tidak melakukannya lagi berada pada kategori baik dengan total 76,923. Walaupun dalam kategori baik, akan tetapi tidak semua wajib pajak yang pernah melakukan tindak pidana dibagian pajak mendapat nasehat atau masukan agar tidak mengulaginya lagi.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pernyataan dalam indikator Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat di simpulkan pada tabel 4.42 Sebagai berikut:

Tabel 4.42: Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan

Item Pertanyaan Pertanyaan	TS (%)	KS (%)	RR (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah skor
Item 1	7,7	3,8	1,9	80,8	5,8	74,615
Item 2	-	7,7	1,9	71,2	19,2	80,384
Item 3	-	15,4	19,2	30,8	34,6	76,923
Rata-Rata	3,84	14,62	16,92	47,72	16,92	231,927

(Sumber data: data primer)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 47,72% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 3,84% responden yang memberikan penilaian tidak pernah.

Jadi adapun hasil dari total sub indikator pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana diagian pajak pada variabe (Y) kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut:

$$\frac{\text{ju s}}{\text{ju it}} = \frac{2,9}{3} = 77,309$$

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan sub indikator dari indikator kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba (Y) yaitu sebesar 77,309 berada pada kategori baik. meskipun masyarakat yang tidak pernah dijaktuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang pajak berada pada kategori baik, akan tetapi masih ada wajib

pajak yang menerima hukuman karena melakukan tindakan pidana dibagian pejak tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tidak dapat dikatakan sebagai berjalan dengan baik. jadi kesadaran wajib pajak akan terhindarnya waji pajak dari tindakan pidana di bagian pajak perlu ditingkatkan sehingga masyarakat atau wajib pajak Kabupaten Bulukumba bisa dikatakan patuh secara keseluruhan dalam membayar pajak

Tabel 4.43: Tanggapan Responden tentang kepatuhan wajib pajak

P ertany Aan	Jawaban Responden										SKOR
	TS		KS		R		S		SS		
		%		%		%		%		%	
Item 1	-	-	13	25,0	10	19,2	20	38,5	9	17,3	181
Item 2	-	1,9	21	40,4	16	30,8	11	21,2	3	5,8	150
Item 3	-	-	1	1,9	14	26,9	32	61,5	5	9,6	197
Item 4	-	-	2	3,8	33	5,8	27	71,2	10	19,2	211
Item 5	-	-	-	-	2	3,8	39	75,0	11	21,2	217
Item 6	-	-	2	3,8	23	44,2	19	36,5	8	15,4	189
Item 7	-	-	3	5,8	2	3,8	39	75,0	8	15,4	208
Item 8	-	-	5	28,8	16	30,8	10	19,2	11	21,2	173
Item 9	-	-	-	-	5	9,6	36	69,2	11	21,2	214
Item 10	-	-	4	7,7	26	50,0	14	26,9	8	15,4	182

Item 11	-	-	8	15,4	20	38,5	20	38,5	4	7,7	176
Item 12	-	-	4	7,7	24	48,1	17	32,7	6	11,5	181
Item 13	-	-	2	3,5	7	23,5	33	63,5	10	19,2	207
Item 14	-	-	12	23,1	15	28,8	18	34,6	7	13,5	176
Item 15	-	-	6	11,5	5	9,6	19	36,5	22	42,3	213
Item 16	-	-	6	11,5	21	40,4	19	36,5	6	11,5	181
Item 17		-	1	1,9	3	5,8	38	73,1	10	19,2	213
Item 18	-	-	9	17,3	17	32,7	14	26,9	12	23,1	185
Item 19	-	-	3	5,8	17	32,7	22	42,3	10	19,2	195
Item 20	-	-	1	1,9	24	46,2	19	36,5	8	15,4	190
Item 21	4	7,7	2	3,8	1	1,9	42	80,8	3	5,8	194
Item 22	-	-	4	7,7	1	1,9	37	71,2	10	19,2	205
Item 23	-	-	8	15,4	10	19,2	16	30,8	18	34,6	200
Item 24	-	11,5	11	21,2	11	21,2	18	34,6	6	11,5	163
Item 25	-	-	13	25,0	21	40,4	11	21,2	7	13,5	168
Totak Skor											4769
Rata-Rata											190

Berdasarkan tabel 4.43 diatas, tanggapan responden tentang kepatuhan wajib pajak total skor sebesar 4769 atau rata-rata skor 190 dari 25 item pertanyaan yang

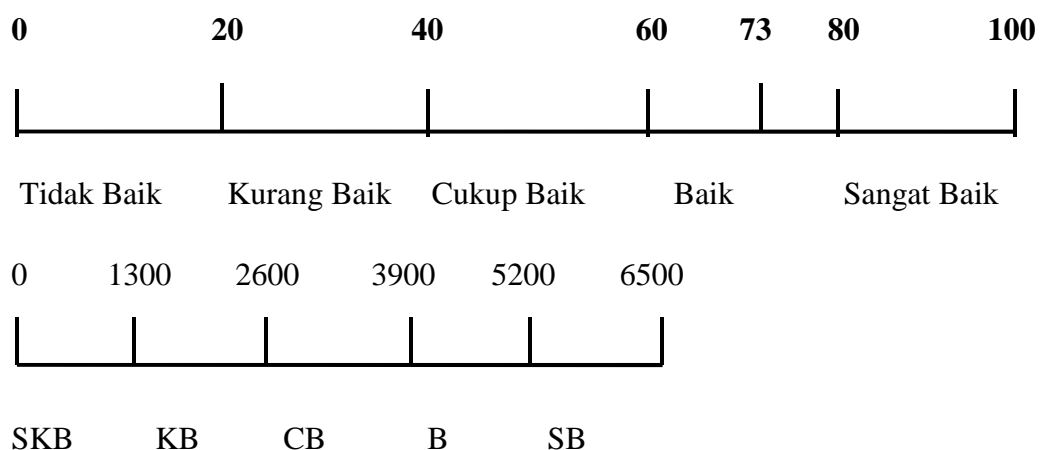
didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor tertinggi pada setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kepemimpinan (Y) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor Maximum} &= \text{Skor tertinggi item pertanyaan} \times N \times \text{Item pertanyaan} \\ &= 5 \times 52 \times 25 = 6500 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 4769 maka tanggapan dari 52 responden terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu:

$$\frac{s}{s_m} \times 100\% = \frac{47}{65} \times 100\% = 73\%$$

Maka hasil analisis sebesar 73% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (Y) ini berada pada penilaian baik.



Keterangan

Sangat Baik (SB) = $5 \times 52 \times 25 = 6500$

Baik (B) = $4 \times 52 \times 25 = 5200$

Cukup Baik (CB) = $3 \times 52 \times 25 = 3900$

Kurang Baik (KB) = $2 \times 52 \times 25 = 2600$

Sangat Kurang Baik (SKB) = $1 \times 52 \times 25 = 1300$

Sesuai dengan tanggapan 52 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba baik. hal ini juga terlihat dari observasi penelitian dilapangan bahwa masyarakat telah patuh dalam membayar pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba melalui sub indikator yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, memenuhi kewajiban pajak.

C. Pengaruh Administrasi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian untuk melihat pengaruh Administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajab dengan jumlah 52 responden. Maka dilakukan Analisis Regresi Sederhana dengan rumus SPSS versi 24 yang dapat diperoleh seperti tabel 4.43 Sampai 4.45 Sebagai berikut:

Tabel 4.44 ANOVA^a

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1061.365	1	1061.365	11.483	.001 ^b
Residual	4621.635	50	92.433		
Total	5683.000	51			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X

Tabel 4.45 **Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.929	15.277		2.745	.008
X	.562	.166	.432	3.389	.001

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.46 **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.170	9.61419

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel diatas pengaruh variabel administrasi perpajakan (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat ditentukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi sederhana dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh linear sederhana antara variabel independen yaitu administrasi perpajakan (X) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor KPP Pratama Kabupate Bulukumba. Pemnagmbilan keputusan dalam uji regesi linear sederhana mengacu pada dua hal yakni:

- a. Jika nilai signifikan lebih kecil $< 0,05$ artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

- b. Jika nilai signifikan lebih besar $> 0,05$ artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.44 Anova digunakan untuk menentukan model persamaan regresi sederhana yang diketahui bahwa nilai F hitung = 11.483 dengan tingkat signifikan sebesar 0,01 lebih kecil dari $< 0,05$ maka variabel Administrasi Perpajakan (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). adapun rumus model persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam menentukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini sebaga berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 41.929 + 0.562 (X)$$

$$Y = 41.929$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 0,562 yang menyatakan bahwa jika administrasi perpajakan (X) nilainya 1 maka hasil kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya positif 41.929. Setiap penambahan 1% nilai kepemimpinan maka nilai kewajiban pajak semakin bertambah sebesar 0,562 koefisien regresi tersebut positif, sehingga dapat dikatakan berpengaruh antara variabel Administrasi perpajakan (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai sebesar 41.929. Apabila ditingkatkan nilai Administrasi perpajakan (X) maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan semakin meningkat berarti ada pengaruh antara administrasi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil nilai signifikan (sig) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga berarti H_a diterima dan H_o ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.46 Model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,432 dari Output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,187 atau 18,7% yang mengandung arti bahwa besarnya pengaruh administrasi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba sebesar 18,7% sedangkan sisanya 0,813 atau 81,3% yang diperoleh dari $100\% - 81,3\% = 18,7\%$ merupakan variabel yang diteliti sedangkan 81,3% variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil observasi peneliti dilapangan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi sebagian wajib pajak Kabupaten Bulukumba tidak jauh dari tempat pembayaran pajak dilakukan atau Kantor pajak Bulukumba sehingga masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu. Serta adanya pembayaran secara online yang di lakukan oleh Direktorat Kantor Pajak sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah, meskipun tidak semua masyarakat Kabupaten Bulukumba melakukan pembayaran secara online akan tetapi cara tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu. Untuk dapat mendalami sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi

terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bulukumba, serta membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum diberlakukannya administrasi perpajakan berbasis teknologi dan sesudah diberlakukannya administrasi perpajakan berbasis teknologi akan diteliti oleh peneliti-peneliti sesudah saya. Dan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berbasis teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba dimana hasil kumulatif menyeluruh untuk indikator administrasi perpajakan berbasis teknologi dan juga dipertegas pada tabel 4.21 tentang tanggapan responden terhadap administrasi perpajakan berbasis teknologi sebesar 73% berada pada kategori baik. Untuk hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa hasil kumulatif kepatuhan wajib pajak sebesar 73% berada pada kategori baik.
2. Untuk hasil uji regresi linear sederhana dimana nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 41.929 dimana nilai signifikan F hitung di tabel *ceofficient* dengan tingkat signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ dan beta pada tabel *ceofficlent* 0.432 dimana nilai signifikan F hitung di tabel *Coefficient* dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dikatakan kuat dimana Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba.

B. Saran

Aadapun saran yang penulis dapat berikan sesuai dengan temuan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya admnistrasi perpajakan berbsais teknologi diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba,sehingga kepatuhan wajib pajak di kabupaten bulukumba dapat dikatakan patuh dalam membayar pajaknya.
2. Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba harus lebih transparansif dalam memberikan layanan kepada wajib pajak dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sehingga memberikan kesan baik kepada wajib pajak.
3. Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba harus mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak kepada negara untuk membantu pembangunan negara, sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajaknya serta mengoptimalkan berjalannya pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara online sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak di kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh administrasi perpajakan berbasis teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada saya ucapkan banyak terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah setiap pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda ceklis** () pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:
 - a. TS : Tidak Sesuai dengan skor 1
 - b. KS : Kurang Sesuai dengan skor 2
 - c. RR : Ragu-Ragu dengan skor 3
 - d. S : Sesuai dengan skor 4
 - e. SS : Sangat Sesuai dengan skor 5

B. Daftar pernyataan

1. Administrasi Perpajakan (Variabel X)

No	Pendaftaran	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat melakukan pendaftaran pajaknya di Kantor KPP Pratama Bulukumba					
2.	Masyarakat terbantu dengan adanya sistem perpajakan berbasis teknologi terutama dibagian pendaftaran pajak					
3.	Masyarakat yang sudah terdaftar pembayaran pajaknya rutin memberikan laporan tentang kewajiban pajaknya di Kantor KPP Pratama					
4.	Masyarakat yang belum terdaftar selalu mencari tahu informasi tentang kapan pendaftaran pajak dilaksanakan atau dilakukan					
5.	Masyarakat yang tidak terdaftar pajaknya mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mendaftarkan pajaknya di Kantor KPP Pratama Bulukumba					

No	Cara Penyampaian SPT	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat sudah patuh dalam menyampaikan surat pemberitahuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak kantor pajak					
2.	Masyarakat terbantu menyimpan data-data seperti surat Pemberitahuan (SPT) dengan adanya <i>E_filling</i>					
3.	Masyarakat paham atau mengetahui langkah-langkah untuk menyimpan data secara online					
4.	Masyarakat menggunakan <i>E_filling</i> untuk menyimpan data-datanya					
5.	Masyarakat memanfaatkan <i>E_filling</i> atau bantuan yang diberikan oleh pihak pajak sehingga dapat mempermudah wajib pajak					

No	Surat Pemberitahuan	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat menyampaikan SPTnya secara rutin					
2.	Masyarakat menerima petunjuk bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)					

	kepada kantor pajak					
3.	Masyarakat mengetahui batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan					
4.	Masyarakat mengetahui dimana mereka harus menyerahkan SPT tahunannya					
5.	Masyarakat mengetahui akibat jika tidak membayar pajak atau melaporkan SPt tahunan					

No	Penyelenggaraan konseling	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat terlihat puas dengan adanya bantuan atau konseling yang diberikan oleh pihak kantor					
2.	Masyarakat selalu melaporkan atau memberitahukan setiap masalah atau kesulitan yang dialami dalam proses pembayaran pajak kepada pegawai kantor					
3.	Masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya penyelenggaraan konseling					
4.	Masyarakat ada yang tidak mengerti dengan konseling yang diberikan oleh pegawai kantor pajak					

5.	Masyarakat mengerti dengan apa yang diberitahukan oleh pegawai kantor pajak apa saja yang mesti dilakukan dalam perpajakan					
----	--	--	--	--	--	--

No	Pembayaran pajak	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui Bank yang disediakan seperti bank persepsi dan pos persepsi					
2.	Masyarakat mengetahui pembayaran melalui internet disediakan oleh bank resepsi sebagai bentuk layanan mereka					
3.	Masyarakat merespon baik pembayara pajak yang disediakan oleh bank resepsi					
4.	Masyarakat mengetahui bahwa kode billing (<i>e_billing</i>) <i>e_filling</i> yang dapat dilakukan melalui jalur internet juga dapat membantu dalam proses pembayaran pajak					
5.	Masyarakat melaporkan kepada pihak pembayaran pajak jika mendapat kesulitan atau masalah dalam proses pembayaran pajaknya					

2. Kepatuhan Wajib Pajak (Vaariabel Y)

No	Tepat waktu dalam menyampaikan SPT	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat selalu mendapatkan informasi kapan waktu wajib pajak melaporkan atau menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT)					
2.	Masyarakat selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT sesuai waktu yang diberlakukan					
3.	Masyarakat tidak pernah mengeluh atau marah saat diingatkan tentang Surat pemberituannya					
4.	Masyarakat saat menyampaikan surat pemberituannya terdapat kesalahan					
5.	Masyarakat mengetahui apa manfaat dan tujuan surat pemberitahuan disampaikan oleh pihak kantor					

No	Memenuhi kewajiban pajak	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5

1.	Masyarakat telah memenuhi kewajiban pajaknya					
2.	Masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajak					
3.	Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya mendapat sanksi berupa teguran					
4.	Masyarakat di kabupaten bulukumba masih banyak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya					
5.	Masyarakat acuh atau tidak peduli dengan kewajiban pajaknya					

No	Tidak mempunyai tunggakan pajak	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat tidak memiliki tunggakan pajak ditahun-tahun yang lalu yang belum diselesaikan sampai sekarang					
2.	Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak membayar tunggakannya secara keseluruhan					
3.	Masyarakat menanyakan kepada pegawai apakah saya memiliki tunggakan pajak di tahun yang lalu					
	Masyarakat memerhatikan pajaknya dari tahun					

4.	ketahun agar tidak ada pajak tunggakannya					
5.	Masyarakat menerima surat pemeberitahuan tunggakan pajak dari kantor pajak					

No	Membayar tepat waktu	Alternatif Jawaban				
		TS	KS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat membayar pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan					
2.	Masyarakat merespon dengan baik pegawai atau seseorang yang bersangkutan menagih pembayaran pajak					
3.	Masyarakat selalu ada diruamh ketika pembayaran pajak yang sudah ditentukan					
4.	Masyarakat acauh tak acuh dalam pembayaran pajak					
5.	Masyarakat dikabupaten bulukumba bisa dikatakan patuh dalam membayar pajak					

1	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	5	3	5	5	4	4	4	4	101	
2	2	4	4	5	3	2	3	3	3	2	3	3	4	5	4	2	5	4	3	3	5	4	3	4	5	88	
3	4	4	4	3	4	2	4	3	4	4	2	2	3	4	2	4	5	5	2	5	4	4	4	4	2	88	
4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	5	4	4	2	5	3	1	4	2	4	4	2	3	3	4	4	84	
5	1	1	2	1	1	1	4	3	3	3	5	3	4	2	4	2	5	4	3	2	5	3	5	4	4	75	
6	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	1	4	5	3	3	5	4	4	4	4	3	93	
7	2	5	4	4	4	2	4	3	4	5	4	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	3	4	4	88	
8	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	3	3	3	5	5	2	5	4	3	5	3	4	4	5	4	99	
9	5	5	4	5	3	4	3	4	3	5	5	5	4	2	4	2	4	3	3	2	5	4	5	4	5	98	
1	0	3	5	4	4	5	2	4	3	4	3	1	1	2	4	2	3	2	2	3	4	4	5	4	4	2	80
1	1	5	5	4	5	4	1	4	4	4	4	4	3	4	5	3	1	2	2	3	4	3	4	4	4	4	90
1	2	2	4	4	4	3	3	3	4	3	2	1	1	4	2	2	5	4	5	2	4	2	4	4	5	4	81
1	3	4	4	5	4	4	3	4	5	3	4	5	5	4	5	4	2	3	4	3	4	4	5	5	4	5	102
1	4	5	5	4	5	5	4	3	4	4	5	2	2	5	4	1	3	5	4	3	3	2	4	4	4	3	93
1	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	5	5	4	3	5	4	5	5	4	4	3	5	99
1	6	4	4	5	4	5	2	4	5	4	5	2	2	3	2	3	2	1	5	4	3	5	4	5	4	4	91
1	7	3	4	5	3	4	2	5	4	5	4	3	2	5	4	2	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	98
1	8	4	5	4	4	4	1	4	5	4	4	5	5	4	5	5	1	5	4	4	4	5	4	4	5	4	103
1	9	2	4	4	5	4	3	4	4	5	5	3	2	4	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	100
2	0	4	5	5	4	5	4	3	3	4	4	4	2	1	4	5	3	1	5	4	4	3	4	4	5	4	94
2	1	5	5	4	4	5	2	4	5	5	3	4	3	5	2	1	5	2	4	5	5	5	4	4	4	5	100
2	2	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	1	4	5	4	2	5	5	5	4	5	4	4	5	4	103
2	3	4	4	5	4	4	2	5	5	4	5	4	3	1	2	3	5	3	4	4	5	4	4	5	4	5	98
2	4	5	5	4	5	4	2	2	4	4	4	3	4	3	4	2	1	4	4	4	4	5	4	5	4	4	94
2	5	4	5	5	4	4	2	4	5	5	3	4	3	2	3	5	5	3	4	5	4	4	5	4	4	5	101
2	6	5	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	3	5	2	3	4	2	5	5	3	4	5	4	4	5	100
2	7	3	5	5	4	4	4	4	3	4	5	4	2	4	1	4	3	5	4	5	5	4	4	4	5	4	99

28	4	5	4	5	4	2	4	3	4	4	4	2	2	4	2	1	4	5	3	5	5	4	4	4	4	92
29	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	5	3	4	2	4	3	3	5	4	4	4	5	100
30	4	4	3	4	5	4	4	5	4	3	3	4	5	3	4	2	4	5	4	5	4	3	4	4	5	99
31	5	5	4	4	4	2	4	3	2	4	3	2	4	5	2	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	89
32	2	4	4	5	4	2	3	3	3	4	4	3	2	1	5	2	4	5	3	3	5	4	3	4	5	87
33	5	5	4	5	4	4	4	3	4	5	3	2	3	5	3	2	5	5	4	2	5	4	4	4	4	98
34	4	4	2	2	4	4	3	4	3	4	2	1	4	2	2	3	1	4	4	4	5	3	3	2	4	78
35	3	5	2	1	1	1	4	3	3	4	3	3	2	4	2	1	3	5	3	5	5	3	5	4	5	80
36	5	4	5	4	2	2	4	2	3	3	3	4	4	3	1	4	4	4	2	4	2	4	4	3	5	85
37	2	5	4	2	4	3	4	3	4	4	3	3	2	5	2	2	3	5	3	4	5	4	4	4	4	88
38	4	5	4	3	4	2	4	3	5	4	5	2	4	2	3	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	96
39	3	4	5	1	4	4	3	3	3	2	5	3	2	1	4	2	1	4	4	2	4	4	4	5	4	81
40	4	4	5	2	2	2	3	4	4	5	4	2	1	2	3	1	5	4	4	3	3	5	3	4	5	84
41	3	4	4	2	4	1	4	3	4	4	3	4	2	4	5	4	3	5	3	4	5	4	4	4	4	91
42	5	5	4	4	3	3	4	4	2	3	4	5	4	2	4	1	2	3	3	3	3	4	4	3	5	87
43	2	4	5	4	3	2	3	4	5	4	4	3	5	3	2	2	3	4	2	3	2	4	2	5	3	83
44	4	4	4	2	4	2	4	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	99
45	5	5	4	4	3	1	4	4	5	4	3	5	2	4	2	3	4	4	3	3	3	4	4	3	5	91
46	3	4	4	5	4	3	5	3	4	4	3	4	4	2	5	2	5	5	3	5	5	4	4	4	4	98
47	4	5	4	4	4	2	4	4	3	3	3	2	3	2	3	1	2	3	4	5	4	4	4	2	4	83
48	5	5	5	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	3	4	5	3	5	3	5	5	4	4	5	4	103
49	2	4	4	5	4	4	3	4	4	3	3	2	1	2	4	3	2	2	4	2	2	4	2	3	5	78
50	5	5	4	5	4	2	4	3	4	4	4	1	4	5	2	2	4	5	3	4	5	4	5	4	4	96

A. Variabel Administrasi Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	26

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.713	.756	26

Item Statistics

Mean	Std. Deviation	N
------	----------------	---

VAR00001	3.69	1.094	52
VAR00002	4.46	.753	52
VAR00003	4.12	.732	52
VAR00004	3.83	1.098	52
VAR00005	3.81	.886	52
VAR00006	2.63	1.030	52
VAR00007	3.75	.622	52
VAR00008	3.67	.760	52
VAR00009	3.77	.783	52
VAR00010	3.94	.802	52
VAR00011	3.44	.938	52
VAR00012	2.96	1.171	52
VAR00013	3.21	1.177	52
VAR00014	3.42	1.319	52
VAR00015	3.06	1.243	52
VAR00016	2.77	1.262	52
VAR00017	3.48	1.336	52
VAR00018	4.10	.934	52
VAR00019	3.46	.851	52
VAR00020	3.90	.934	52
VAR00021	4.00	1.103	52
VAR00022	4.02	.505	52
VAR00023	3.96	.713	52
VAR00024	4.06	.698	52
VAR00025	4.19	.817	52
VAR00026	93.40	6.661	52

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	181.42	202.719	.385	.789	.699
VAR00002	180.65	209.839	.252	.768	.708
VAR00003	181.00	208.392	.330	.776	.705
VAR00004	181.29	204.248	.333	.828	.702
VAR00005	181.31	203.511	.459	.802	.698
VAR00006	182.48	208.568	.211	.816	.708
VAR00007	181.37	209.962	.308	.718	.707
VAR00008	181.44	209.585	.261	.675	.707
VAR00009	181.35	207.054	.366	.773	.703
VAR00010	181.17	208.420	.295	.624	.706
VAR00011	181.67	208.185	.253	.844	.707
VAR00012	182.15	207.427	.211	.852	.708
VAR00013	181.90	206.834	.227	.840	.707
VAR00014	181.69	205.198	.237	.827	.706
VAR00015	182.06	206.173	.229	.853	.707
VAR00016	182.35	206.741	.209	.890	.708
VAR00017	181.63	205.021	.238	.863	.706
VAR00018	181.02	206.176	.330	.652	.703
VAR00019	181.65	207.172	.327	.733	.704
VAR00020	181.21	208.405	.246	.559	.707
VAR00021	181.12	205.281	.298	.645	.704
VAR00022	181.10	210.285	.367	.636	.707
VAR00023	181.15	209.780	.272	.658	.707
VAR00024	181.06	209.781	.279	.699	.707
VAR00025	180.92	209.053	.262	.658	.707
VAR00026	91.71	65.817	.978	.993	.670

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
185.12	215.908	14.694	26

B. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	26

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.707	.871	26

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3.51	1.046	51
VAR00002	2.92	.935	51
VAR00003	3.78	.642	51
VAR00004	4.06	.645	51
VAR00005	4.18	.478	51
VAR00006	3.65	.796	51
VAR00007	4.00	.663	51
VAR00008	3.35	1.110	51
VAR00009	4.12	.553	51
VAR00010	3.49	.857	51
VAR00011	3.41	.829	51
VAR00012	3.51	.784	51
VAR00013	3.98	.707	51
VAR00014	3.41	.983	51
VAR00015	4.12	.993	51
VAR00016	3.51	.834	51
VAR00017	4.10	.575	51
VAR00018	3.59	1.023	51
VAR00019	3.75	.845	51
VAR00020	3.67	.766	51
VAR00021	3.73	.940	51
VAR00022	3.92	.956	51
VAR00023	3.88	1.052	51
VAR00024	3.14	1.233	51
VAR00025	3.22	.986	51
VAR00026	93.80	10.266	51

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	182.27	378.443	.223	.629	.703
VAR00002	182.86	372.761	.415	.744	.697
VAR00003	182.00	374.240	.562	.733	.697
VAR00004	181.73	376.323	.474	.632	.699
VAR00005	181.61	380.803	.407	.632	.702
VAR00006	182.14	375.121	.417	.601	.698
VAR00007	181.78	375.133	.507	.805	.698
VAR00008	182.43	377.330	.233	.458	.702
VAR00009	181.67	376.187	.565	.781	.698
VAR00010	182.29	367.452	.621	.763	.691
VAR00011	182.37	370.798	.537	.819	.694
VAR00012	182.27	376.403	.381	.628	.699
VAR00013	181.80	372.601	.568	.768	.696
VAR00014	182.37	376.438	.294	.661	.700
VAR00015	181.67	380.467	.185	.740	.704
VAR00016	182.27	372.243	.487	.620	.696
VAR00017	181.69	377.980	.461	.641	.700
VAR00018	182.20	364.961	.578	.766	.690
VAR00019	182.04	366.158	.672	.801	.690
VAR00020	182.12	373.066	.506	.757	.696
VAR00021	182.06	373.016	.405	.901	.697
VAR00022	181.86	373.481	.385	.890	.698
VAR00023	181.90	377.930	.234	.470	.702
VAR00024	182.65	374.873	.256	.468	.701

VAR00025	182.57	374.930	.333	.566	.699
VAR00026	91.98	91.860	.972	.979	.827

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
185.78	388.613	19.713	26

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables		Method
	Entered	Removed	
1	X ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.170	9.61419

a. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	41.929	15.277		2.745	.008
X	.562	.166	.432	3.389	.001

a. Dependent Variable: Y

10	Pearson Correlation	0.225	0.175	0.145	0.167	0.122	0.109	0.091	0.197	1	0.113	0.061	-0.111	0.172	-0.095	0.006	0.086	0.097	-0.161	0.001	0.057	0.158	-0.020	-0.025	.361**	
	Sig. (2-tailed)	0.109	0.215	0.305	0.238	0.339	0.451	0.573	0.162		0.426	0.668	0.432	0.223	0.503	0.967	0.544	0.493	0.255	0.995	0.687	0.262	0.891	0.066	0.009	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
11	Pearson Correlation	0.059	-0.100	0.124	-0.058	-0.012	-0.009	0.059	-0.045	0.113	1	.416**	0.002	-0.107	.432**	-0.227	-0.002	-0.005	0.231	0.173	-0.170	-0.014	0.241	0.143	0.110	.321*
	Sig. (2-tailed)	0.679	0.479	0.380	0.685	0.532	0.599	0.679	0.754	0.426		0.002	0.987	0.451	0.001	0.166	0.973	0.100	0.219	0.227	0.924	0.086	0.313	0.819	0.439	0.020
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
12	Pearson Correlation	0.117	-0.144	0.025	-0.018	-0.047	-0.031	0.080	-0.090	0.061	.416**	1	-0.011	0.131	0.241	-0.069	-0.087	-0.089	0.046	0.202	-0.164	0.050	-0.174	0.020	-0.260	.290*
	Sig. (2-tailed)	0.409	0.307	0.859	0.901	0.785	0.814	0.571	0.526	0.668	0.002		0.938	0.353	0.085	0.627	0.539	0.532	0.746	0.152	0.246	0.726	0.217	0.167	0.062	0.037
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
13	Pearson Correlation	0.204	0.020	-0.120	0.081	0.079	0.189	0.167	0.011	-0.111	0.002	1	-0.008	-0.183	-0.060	0.070	0.106	-0.021	-0.094	0.200	0.021	-0.079	0.070	-0.170	-0.058	.295*
	Sig. (2-tailed)	0.147	0.886	0.397	0.202	0.492	0.200	0.238	0.936	0.432	0.937		0.954	0.195	0.673	0.225	0.455	0.882	0.509	0.156	0.882	0.578	0.228	0.288	0.065	0.034
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
14	Pearson Correlation	0.160	0.155	-0.052	0.119	0.072	0.084	-0.075	0.134	0.172	-0.107	0.131	-0.008	1	-0.087	-0.070	0.094	-0.090	-0.075	0.221	-0.08	-0.083	-0.119	-0.158	-0.158	.321*
	Sig. (2-tailed)	0.257	0.273	0.716	0.204	0.326	0.556	0.600	0.342	0.223	0.451	0.353	0.954		0.540	0.600	0.509	0.525	0.597	0.115	0.955	0.555	0.544	0.422	0.020	0.020

	d)				0 0	4 4	1 4										2 3	6 2						5 7	0 2	6 3	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
15	Pearson Correlation	-0.160	-0.238	0.057	0.022	0.035	0.018	0.012	0.016	-0.047	-0.095	.432**	0.021	-0.018	-0.087	1	-0.011	0.019	0.025	0.010	-0.017	-0.005	-0.000	-0.000	0.000	0.000	
	Sig. (2-tailed)	0.258	0.089	0.687	0.878	0.841	0.818	0.395	0.241	0.743	0.503	0.001	0.085	0.195	0.540		0.283	0.160	0.071	0.464	0.221	0.969	0.666	0.650	0.037		
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
16	Pearson Correlation	0.004	-0.010	.305	-0.000	0.018	0.011	0.020	-0.001	.283	0.006	-0.022	-0.009	0.060	-0.070	-0.016	1	-0.020	0.065	0.015	-0.008	0.238	-0.044	0.015	0.018		
	Sig. (2-tailed)	0.975	0.947	0.028	0.999	0.843	0.817	0.156	0.894	0.042	0.967	0.106	0.627	0.063	0.623	0.239		0.855	0.151	0.649	0.290	0.561	0.038	0.370	0.197		
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
17	Pearson Correlation	-0.138	-0.147	-0.078	0.038	-0.069	-0.041	0.006	-0.019	0.013	0.024	0.006	-0.018	0.017	0.026	0.018	-0.000	1	0.024	-0.009	0.002	0.016	-0.071	0.000	0.011		
	Sig. (2-tailed)	0.328	0.299	0.583	0.332	0.372	0.474	0.967	0.178	0.193	0.079	0.664	0.235	0.225	0.062	0.897	0.555		0.080	0.500	0.875	0.243	0.615	0.960	0.036		
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
18	Pearson Correlation	0.010	-0.092	0.012	-0.013	0.017	0.009	0.021	-0.012	0.013	0.008	-0.005	-0.008	0.010	0.009	0.019	-0.020	1	0.091	0.048	0.004	-0.096	0.055	0.043	0.016		
	Sig. (2-tailed)	0.942	0.516	0.932	0.335	0.437	0.448	0.134	0.395	0.328	0.544	0.973	0.539	0.455	0.509	0.160	0.511		0.521	0.735	0.865	0.499	0.700	0.661	0.127		
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
19	Pearson Correlation	0.240	0.089	0.039	-0.040	.353	-0.038	-0.026	0.048	0.009	0.023	-0.009	-0.002	-0.009	-0.020	0.025	0.006	-0.000	1	0.091	-0.383**	0.028	-0.000	0.000	0.005		

	on				18											59	66						36	69	
	Sig. (2-tailed)	0.087	0.0528	0.0785	0.0901	0.0026	0.0794	0.0544	0.0750	0.0493	0.1030	0.0532	0.0882	0.0525	0.0711	0.0649	0.0520	0.0521	0.0926	0.0005	0.842	0.0880	0.0743	0.0677	0.0288
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
20	Pearson Correlation	-0.207	-0.114	-0.0212	-0.0330	-0.0603	-0.1212	-0.0130	0.024	-0.0161	0.0173	0.0046	-0.0094	-0.0075	0.0104	0.0105	0.0048	0.0013	1	-0.003	-0.276	0.0103	0.0205	-0.0059	0.017
	Sig. (2-tailed)	0.142	0.240	0.131	0.017	0.056	0.024	0.0357	0.0867	0.0255	0.0219	0.0746	0.0509	0.0597	0.0464	0.0290	0.0735	0.0926	0.981	0.048	0.006	0.0466	0.0863	0.0678	0.0906
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
21	Pearson Correlation	0.025	-0.007	-0.343	0.067	-0.091	-0.015	-0.014	-0.004	0.001	-0.0170	0.0202	0.0200	0.0221	-0.0173	-0.0083	0.0115	-0.0083	1	-0.003	-0.357	0.0224	-0.0109	-0.0239	-0.017
	Sig. (2-tailed)	0.860	0.959	0.013	0.0638	0.0520	0.0920	0.0128	0.0767	0.0995	0.0227	0.0152	0.0156	0.0115	0.0221	0.0561	0.0225	0.0865	0.005	0.981	0.009	0.009	0.0865	0.0401	0.0903
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
22	Pearson Correlation	0.069	.292	.623	0.062	-0.058	0.0173	0.0153	0.0234	0.0057	-0.004	-0.004	-0.001	-0.008	-0.005	0.0038	0.0071	-0.0096	1	-0.276	.357	0.005	0.0351	0.0366	0.312
	Sig. (2-tailed)	0.628	0.036	0.000	0.055	0.024	0.0221	0.0278	0.0094	0.0687	0.0924	0.0246	0.0882	0.0955	0.0969	0.0895	0.0815	0.0499	0.0842	0.008	0.009	0.009	0.0690	0.0826	0.024
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
23	Pearson Correlation	0.048	-0.017	-0.0078	-0.0147	-0.0227	0.0119	0.0147	0.0019	0.0158	0.0241	0.0050	0.0079	-0.0083	-0.0062	-0.0044	0.0007	-0.0056	1	0.024	-0.057	0.0103	0.0014	-0.0144	-0.005
	Sig. (2-tailed)	0.733	0.225	0.0584	0.0299	0.0067	0.0402	0.0298	0.0892	0.0262	0.0086	0.0726	0.0578	0.0557	0.0660	0.0390	0.0700	0.0802	0.466	0.865	0.690	0.030	0.0308	0.0930	0.974

Correlations Y

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Pea rso n Corr elati on	1	- 0. 10 1	0. 00 8	0. 04 5	0. 06 1	- 0. 16 1	0. 14 1	0 .2 4 7	. 3 4 3	- 0. 05 4	0. 02 0 6	- 0. 11 6	0. 03 9	0. 01 9	0. 01 4	0. 04 3	0. 05 2	0. 01 8	.31 6*	.35 6**	0. 07 4	0 .1 0 5	0 .2 5 7	0 .1 6 0	- 0. 1 5	. 0 0 1 5	. 2 8 2
	Sig. (2- taile d)		0. 47 9	0. 95 3	0. 75 0	0. 06 1	0. 25 5	0. 31 8	0 0 7 8	0 0 1 3	0. 70 1	0. 41 4 2	0. 78 2	0. 40 0	0. 46 2	0. 76 1	0. 71 4	0. 20 2	0.0 23	0.0 10	0. 60 1	0 0 4 5	0 0 6 6	0 0 5 8	0 0 2 8	. 9 1 4	. 0 9 3	
	N	52	51	52	52	52	52	52	52	5 5 2 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
2	Pea rso n Corr elati on	- 0. 10 1	1	.5 71**	.3 73**	0. 21 1	.4 19**	0. 06 5	0 .1 4 3	. 2 8 9	.4 98**	0. 09 4	0. 01 3 7	0. 02 0	0. 01 0	- 0. 24 8	.3 35	0. 23 8	.3 42	.27 8*	0.1 86	- 0. 13 9	- 0 1 6 4	0 .1 5 3	0 .0 7 8	0 0 0 2	. 4 6 7	. 4 6 7
	Sig. (2- taile d)	0. 47 9		0. 00 0	0. 00 7	0. 13 8	0. 00 2	0. 65 3	0 3 1 7	0 0 4 0	0. 00 0	0. 53 6	0. 09 0	0. 13 9	0. 07 9	0. 01 6	0. 09 3	0. 01 4	0.0 48	0.1 91	0. 33 1	0 0 2 5	0 0 8 3	0 0 5 8	0 0 8 8	. 6 0 1	. 0 0 1	
	N	51	51	51	51	51	51	51	5 5 1 1	51	5 1	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	5 1	5 1	5 1	5 1	5 1	5 1
3	Pea rso n Corr elati on	0. 00 8	.5 71**	1	.4 16**	0. 25 4	.3 10*	0. 18 8	0 .1 5 5	. 4 0 9	.4 88**	.3 0*	0. 16 4	.2 99*	.3 17*	- 0. 24 6	0. 26 4	.3 28*	.3 90**	.37 7**	0.1 69	0. 20 0	0 0 4 4	0 0 1 8	0 0 2 5	- 0 0 1	. 5 0 4	. 5 0 0
	Sig. (2- taile d)	0. 95 3	0. 00 0		0. 00 2	0. 06 9	0. 02 5	0. 18 3	0 2 7 4	0 0 0 3	0. 00 0	0. 24 5	0. 03 1	0. 02 2	0. 07 9	0. 05 9	0. 01 8	0. 00 4	0.0 06	0.2 31	0. 15 6	0 0 7 5	0 0 1 9	0 0 8 9	0 0 4 9	. 9 0 4	. 0 0 1	. 0 0 0
	N	52	51	52	52	52	52	52	5 5 2 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
4	Pea rso n Corr elati on	0. 04 5	.3 73**	.4 16**	1	.2 90*	0. 19 7	.2 80*	0 .2 2 1	. 4 8 5	.3 42*	0. 01 4 9	0. 05 9	.4 41**	0. 11 9	0. 08 4	0. 02 0	.3 08*	0. 21 7	.32 1*	0.1 22	.4 22**	0 2 3 0	0 0 9 9	0 0 7 0	- 0 0 0	. 4 8 6	. 4 8 6
	Sig. (2- taile d)	0. 75 0	0. 00 7	0. 00 2		0. 03 7	0. 16 1	0. 04 4	0 1 1 6	0 0 0 0	0. 01 3	0. 67 6	0. 40 1	0. 55 6	0. 88 8	0. 02 6	0. 12 3	0.0 20	0.3 89	0. 00 2	0 0 1 0	0 0 8 5	0 0 4 2	0 0 6 1	0 0 2 1	. 7 0 0	. 0 7 0	. 0 0 0
	N	52	51	52	52	52	52	52	5 5 2 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
5	Pea rso n Corr elati	0. 26 1	0. 21 1	0. 25 4	.2 90*	1	0. 11 9	0. 00 0	0 .3 3 9	. 7 5	0. 17 0	0. 01 2 5	0. 08 6	0. 24 7	0. 18 9	- 0. 03 6	0. 17 9	.3 73**	0. 07 9	0.2 60	0.1 15	0. 24 1	0 1 9 5	0 2 4 6	. 2 8 2	0 2 5 0	. 4 1 7	. 4 1 7

19	Pea rso n Corr elati on	.3 16	.2 78	.3 77	.3 21	0. 26 0	0. 21 4	0. 17 8	. 3 8 3	. 4 0 6	.5 36	0. 1 6 7	0. 24 0	.4 27	0. 18 9	0. 10 0	.4 19	0. 21 6	.3 67	1	.41 4	0. 18 9	0. 1 2 8	0. 1 9 6	. 3 6 2	0. 2 3 8	. 6 4 6	
	Sig. (2- taile d)	0. 02 3	0. 04 8	0. 00 6	0. 02 0	0. 06 3	0. 12 7	0. 20 6	0 0 5	0 0 3	0. 00 0	0. 2 3 8	0. 08 6	0. 00 2	0. 18 0	0. 48 1	0. 00 2	0. 12 4	0. 00 7		0.0 02	0. 18 1	0 3 6 5	0 1 6 3	. 0 0 8	0 0 8 9	0 0 0 0	
	N	52	51	52	52	52	52	52	5 2	5 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
20	Pea rso n Corr elati on	.3 56	0. 18 6	0. 16 9	0. 12 2	0. 11 5	0. 17 6	.3 91	0 0 3	0 0 5	0. 15 1	.5 4 5	0. 05 3	.3 17	- 0. 08 0	0. 07 0	.2 91	0. 12 3	.5 21	.41 4	1	0. 17 0	0 2 4 0	0 0 7 7	. 0 1 4 7	0 0 0 0	. 3 5 4 0	. 5 5 0 0
	Sig. (2- taile d)	0. 01 0	0. 19 1	0. 23 1	0. 38 9	0. 41 8	0. 21 3	0. 00 4	0 3 3 9	0 7 2 2	0. 28 6	0. 0 0	0. 71 0	0. 02 2	0. 05 5	0. 62 0	0. 03 6	0. 38 4	0. 00 0	0.0 02		0. 22 9	0 8 8 7	0 5 4 6	. 4 0 1 9	0 0 1 3	0 0 0 0	
	N	52	51	52	52	52	52	52	5 2	5 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
21	Pea rso n Corr elati on	0. 07 4	- 0. 13 9	0. 20 0	.4 22	0. 24 1	- 0. 13 6	.6 73	0 0 1 1	. 3 7 0	0. 12 4	.4 8 4	0. 01 9	.5 03	- 0. 07 7	.2 82	- 0. 08 1	0. 23 5	0. 07 7	0.1 89	0.1 70	1	. 8 1 7	- 0. 1 0	- 0. 0 2	0 2 1	. 4 0 5	
	Sig. (2- taile d)	0. 60 1	0. 33 1	0. 15 6	0. 00 2	0. 08 5	0. 33 7	0. 00 0	0 9 3 9	0 0 7	0. 38 3	0. 0 0	0. 89 3	0. 00 0	0. 05 9	0. 04 3	0. 56 9	0. 09 4	0. 58 6	0.1 81	0.2 29		0 0 0 0	0 4 7 6	0 8 5 6	0 0 6 6	0 0 8 0	
	N	52	51	52	52	52	52	52	5 2	5 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
22	Pea rso n Corr elati on	0. 10 5	- 0. 16 4	0. 04 4	0. 23 0	0. 19 5	- 0. 10 6	.6 85	0 0 0 0	. 0 2 3 7	0. 06 0	.4 6 5	- 0. 01 4	.3 20	- 0. 22 3	0. 25 3	0. 03 5	0. 04 6	0. 15 1	0.1 28	0.2 40	.8 17	1	- 0. 1 8	- 0. 0 4	. 0 0 8	. 3 6 8	
	Sig. (2- taile d)	0. 45 7	0. 25 1	0. 75 7	0. 10 1	0. 16 5	0. 45 6	0. 00 0	0 9 9 8	0 0 9 1	0. 67 2	0. 0 1	0. 92 0	0. 02 1	0. 11 1	0. 07 1	0. 80 7	0. 74 4	0. 28 4	0.3 65	0.0 87	0. 00 0		0 2 0 1	0 7 4 7	0 0 0 7	0 0 0 0	
	N	52	51	52	52	52	52	52	5 2	5 2	52	5 2	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
23	Pea rso n Corr elati on	0. 25 7	0. 15 3	0. 18 1	0. 09 9	0. 24 6	0. 25 5	0. 00 0	- 0. 1 7	0 0 6 4	0. 10 7	0. 0 6 7	0. 17 8	0. 07 4	.3 32	0. 21 6	0. 10 4	0. 15 3	0. 09 6	0.1 96	0.0 77	- 0. 10 1	- 0. 1 8	1	- 0 0 8	- 0 0 3	. 3 0 8	
	Sig. (2- taile d)	0. 06 6	0. 28 3	0. 19 9	0. 48 5	0. 07 8	0. 06 8	1. 00 0	0 0 6 2	0 0 4 9	0. 44 9	0. 0 3	0. 20 6	0. 60 1	0. 01 6	0. 12 4	0. 46 3	0. 27 9	0. 49 7	0.1 63	0.5 86	0. 47 6	0 0 2		0 0 3	0 0 9	0 0 0	

	d)								1	4													0			6	8	2
	N	52	51	52	52	52	52	52	5	5	52	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5	5	5	5	5	5
24	Pearson Correlation	0.160	0.078	0.205	0.070	.282	.316	-0.168	0.017	0.023	.324	-0.018	0.023	0.136	0.151	-0.055	0.263	0.130	0.149	.362**	0.107	-0.026	-0.044	-0.016	1	-0.017	.282	
	Sig. (2-tailed)	0.258	0.588	0.144	0.624	0.043	0.022	0.234	0.368	0.013	0.019	0.087	0.035	0.028	0.070	0.060	0.035	0.027	0.029	0.008	0.449	0.856	0.744	0.367		0.217	0.043	
	N	52	51	52	52	52	52	52	5	5	52	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5	5	5	5	5	5	
25	Pearson Correlation	-0.015	0.062	-0.014	-0.053	0.250	-0.066	.334*	-0.010	0.047	0.024	0.154	.292*	0.028	0.097	0.076	0.135	0.198	0.238	.344*	0.241	.368**	-0.080	-0.017	-0.003	1	.333*	
	Sig. (2-tailed)	0.919	0.665	0.919	0.710	0.074	0.643	0.015	0.455	0.741	0.079	0.034	0.085	0.049	0.059	0.344	0.159	0.089	0.086	0.013	0.086	0.007	0.094	0.081	0.047		0.016	
	N	52	51	52	52	52	52	52	5	5	52	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5	5	5	5	5	5	
26	Pearson Correlation	.282	.467**	.550**	.486**	.417**	.455**	.515**	.273	.602**	.599**	.451**	.571**	.328*	.280*	.539**	.486**	.636**	.646**	.550**	.405**	.336	.338	.308	.282	.333*	1	
	Sig. (2-tailed)	0.043	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.049	0.000	0.000	0.001	0.000	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.007	0.027	0.043	0.077	0.041	0.036		
	N	52	51	52	52	52	52	52	5	5	52	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	5	5	5	5	5	5	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1061.365	1	1061.365	11.483	.001 ^b
	Residual	4621.635	50	92.433		
	Total	5683.000	51			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.929	15.277		2.745	.008
	X	.562	.166	.432	3.389	.001

a. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.170	9.61419

a. Predictors: (Constant), X

Dokumentasi :



RIWAYAT HIDUP



Erni M, lahir pada tanggal 05 November 1994 di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Anak ke 3 dari 5 bersaudara dari pasangan Malla dan Samo'. Bertempat tinggal di Jln, Sultan Alauddin 3. Memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 276 Campulea pada tahun 2001 dan tamat

pada tahun 2008. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Mts Tonrong dan tamat pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MAN Bulukumba dan tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014 dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada program Strata Satu (S1).

Pada akhir studi, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengaruh Administrasi Perpajakan berbasis teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Bulukumba”.